



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025-2029

DP3AP2KB KOTA CILEGON

Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

<http://dp3ap2kb.cilegon.go.id/>

[dp3ap2kb.cilegon](#)

[Dptgakkotacilegon](#)



BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2025

NOMOR : 32

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga sinergitas perencanaan jangka menengah tingkat kota serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kota Cilegon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana ...

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - i. Dinas Tenaga Kerja;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - r. Inspektorat Daerah;
 - s. Badan ...

- s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah;
 - t. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
 - u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - v. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - w. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - y. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - z. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - aa. Sekretariat Daerah;
 - bb. Sekretariat DPRD;
 - cc. Kecamatan Jombang;
 - dd. Kecamatan Purwakarta;
 - ee. Kecamatan Cilegon;
 - ff. Kecamatan Citangkil;
 - gg. Kecamatan Gerogol;
 - hh. Kecamatan Cibeber;
 - ii. Kecamatan Ciwandan; dan
 - jj. Kecamatan Pulomerak.
- (3) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Pasal 4

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi:
 - a. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD;
 - b. Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan RPJMD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Daerah wajib melakukan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan RKPD dan/atau penetapan perubahan RPJMD.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Pasal ...

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 11 September 2025

WALI KOTA CILEGON,

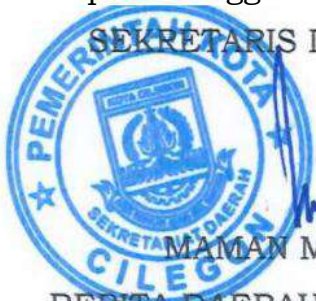
ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta atas Rahmat dan Karunia-Nya yang melimpah sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon periode Tahun 2025 – 2029 . Renstra merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Penyusunan Renstra sebagai kerangka dasar bagi perencanaan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen Perangkat Daerah.

Tujuan Rencana Strategi DP3AP2KB Kota Cilegon adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kota Cilegon sebagai institusi Perangkat Daerah di kota Cilegon yang merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya. Selain itu untuk menjabarkan visi dan misi Wali Kota terpilih kedalam kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kota Cilegon.

Renstra disusun sebagai penegasan komitmen DP3AP2KB Kota Cilegon yang peduli kepada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Cilegon. Sebagai tolok ukur kinerja dalam evaluasi dan pelaporan kinerja DP3AP2KB Kota Cilegon, memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cilegon selama kurun waktu lima tahun.

Oleh karena itu penyusunan Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh bagian DP3AP2KB Kota Cilegon dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan menyelaraskan visi misi strategis dan kebijakan kepala daerah terpilih dengan program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Cilegon.

Komitmen peningkatan sinergisitas kinerja dari seluruh bagian DP3AP2KB Kota Cilegon menjadi sangat penting guna mewujudkan tujuan Perangkat Daerah dan tujuan Kota Cilegon secara keseluruhan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkerjasama dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon tahun 2025 – 2029 semoga bermanfaat dalam mendukung pembangunan Kota Cilegon.

Cilegon, September 2025

KEPALA DP3AP2KB KOTA CILEGON



Hj. Lia Nurlia Mahatma, ST., M.Si.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197107081997032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	84
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	106
3.1 Tujuan Perangkat Daerah dan Sasaran	106
3.2 Strategi Perangkat Daerah	109
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	109
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	112

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	112
4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Kepala Daerah/ Janji Politik	164
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	164
BAB V PENUTUP	167
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Susunan Organisasi DP3AP2KB Kota Cilegon	50
-----------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	52
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan Tahun 2025	53
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	54
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Diklat yang diikuti Tahun 2024	54
Tabel 2.7	Sarana Prasarana DP3AP2KB	57
Tabel 2.8	Target dan Capaian Kinerja Pelayanan DP3A2PKB Kota Cilegon Tahun 2020 – 2024	73
Tabel 2.9	Rencana Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2020 – 2024	78
Tabel 2.10	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3AP2KB Kota Cilegon	85
Tabel 2.11	Rumusan Isu Strategis DP3AP2KB	105
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon	108
Tabel 3.2	Penahapan Renstra	109
Tabel 3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon ..	110
Tabel 4.1	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan DP3AP2KB Kota Cilegon	118

Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Kepala Daerah/ Janji Politik	164
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon	165
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon	165

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cilegon yang memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon No. 11 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Daerah untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan kebijakan dan program Pemerintah Kota Cilegon.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Kota Cilegon dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan perempuan dan masyarakat dalam mengambil keputusan pada tiap tiap proses pembangunan, dan selalu memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta perempuan dan masyarakat. Menggunakan program atau kegiatan yang disepakati agar

mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh perempuan, masyarakat dan anak-anak, sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab perempuan dan masyarakat yang mengarah pada terwujudnya kemandirian, serta diharapkan mampu menciptakan koordinasi program dengan berbagai pihak dan menangani berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan di Kota Cilegon.

Dalam rangka memberikan acuan penyelenggaraan program kerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta evaluasi kinerja dinas, maka dilakukan upaya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon, sebagai salah satu acuan dokumen evaluasi kinerja pembangunan di Kota Cilegon secara keseluruhan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyelarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota terkait penjabaran visi, misi, dan program wali kota dan wakil wali kota terpilih juga

merupakan bagian pendukung pelaksanaan 7 (Tujuh) Program Strategis, 17 (Tujuh Belas) Program Unggulan, dan Program Kerja (*Quick Wins*) 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon tahun 2025 – 2029.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);

14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 127).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi DP3AP2KB Kota Cilegon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mengacu pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025 – 2029 .

Renstra 2025 – 2029 disusun sebagai Pedoman dan acuan untuk mencapai tujuan dan sasaran DP3AP2KB melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang terukur dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan DP3AP2KB Kota

Cilegon Tahun 2025 - 2029.

- b. Menetapkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Anggaran DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 – 2029.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 - 2029.
- d. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025 - 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon Tahun 2025 - 2029 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Mendeskripsikan Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mendeskripsikan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang berisi Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat

Daerah, Kelompok Sasaran Layanan; Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mendeskripsikan Tujuan Perangkat Daerah dan Sasaran; Strategi Perangkat Daerah; Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mendeskripsikan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan; Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Kepala Daerah/ Janji Politis; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V PENUTUP

Mendeskripsikan Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh DP3AP2KB Kota Cilegon. Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Cilegon yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Cilegon dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

2.1.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cilegon dan diperjelas dengan Peraturan Wali Kota Cilegon No. 11 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Dinas Daerah menetapkan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan fungsi:

- a. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Perlindungan perempuan;
- c. Peningkatan kualitas keluarga;
- d. Pengelolaan sistem data gender dan anak;
- e. Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- f. Perlindungan khusus anak;
- g. Pengendalian penduduk;
- h. Pembinaan Keluarga Berencana;
- i. Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera;
- j. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas Kepala Dinas sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan Penyelenggaraan :

- 1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 2) Program perlindungan perempuan;
- 3) Program peningkatan kualitas keluarga;
- 4) Program pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 6) Program perlindungan khusus anak;
- 7) Program pengendalian penduduk;
- 8) Program pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- 9) Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); dan/atau
- 10) Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

b. Pentahapan merumuskan penyelenggaraan :

- 1) Menetapkan rencana kerja berdasarkan rencana strategis perangkat daerah;
 - 2) Menetapkan hasil dialog kinerja dalam menentukan strategi perumusan pencapaian kinerja melalui penerapan sistem kerja;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi secara internal dan eksternal perangkat daerah;
 - 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di lingkungan Unit Organisasi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;
 - 5) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang dijalankan;
 - 6) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan
 - 7) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup Unit Organisasi
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas Sekretaris sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas :

- 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 2) Administrasi keuangan perangkat daerah;
- 3) Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- 4) Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- 5) Administrasi umum perangkat daerah;
- 6) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 7) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 8) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; dan/atau
- 9) Koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang

b. Pentahapan menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas :

- 1) Menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan;
- 2) Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait;
- 4) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di

- lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;
 - 6) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas;
 - 7) Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan
 - 8) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas:

- a) Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD;
- b) Pengamanan barang milik daerah SKPD;
- c) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
- d) Pemanfaatan barang milik daerah SKPD;
- e) Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
- f) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- g) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- h) Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- i) Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- j) Pemindahan tugas pegawai lingkup perangkat daerah;
- k) Perencanaan dan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- l) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- m) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- n) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- o) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- p) Penyediaan peralatan rumah tangga;
- q) Penyediaan bahan logistik kantor;
- r) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- s) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

- t) Penyediaan bahan/material;
- u) Fasilitasi kunjungan tamu;
- v) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- w) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
- x) Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- y) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- z) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- aa) Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
- bb) Pengadaan mebel;
- cc) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- dd) Pengadaan aset tetap lainnya;
- ee) Pengadaan aset tak berwujud;
- ff) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- gg) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- hh) Penyediaan jasa surat menyurat;
- ii) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- jj) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- kk) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- ll) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- mm) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak

- dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- nn) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;
 - oo) Pemeliharaan mebel;
 - pp) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - qq) Pemeliharaan aset tetap lainnya;
 - rr) Pemeliharaan aset tak berwujud;
 - ss) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - tt) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - uu) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - vv) Pelayanan informasi publik dan diseminasi informasi;
 - ww) Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - xx) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
 - yy) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;
 - zz) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
 - aaa) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;
 - bbb) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - ccc) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

dan/atau perumusan rancangan perjanjian kerjasama;
dan/atau

ddd) Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pentahapan menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas sebagai berikut :

a) Menyusun rancangan rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan untuk dibahas bersama dengan atasan langsung;

b) Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan rancangan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;

c) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya;

d) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;

e) Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;

f) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang menjadi kewenangan unit kerjanya;

g) Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas;
dan

h) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung

3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja

- 4) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Tim Kerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tim Kerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah termasuk jabatan nonmanajerial. Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Uraian tugas Tim Kerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas:
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
 - e) Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD;
 - f) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

- g) Evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - h) Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, pelayanan publik, pengelolaan SPI, serta fasilitasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - i) Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah;
 - j) Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah;
 - k) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - l) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD;
 - m) Koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu;
 - n) Sinkronisasi dan harmonisasi Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan; dan/atau
 - o) Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pentahapan menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas sebagai berikut :
- a) Menyusun rancangan rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan untuk dibahas bersama dengan atasan langsung
 - b) Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan rancangan

strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja

- c) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya
 - d) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku
 - e) Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja
 - f) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang menjadi kewenangan unit kerjanya
 - g) Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas
 - h) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung
- 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja
- 4) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Tim Kerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tim Kerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah termasuk jabatan nonmanajerial. Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Uraian tugas Tim Kerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas:
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 - c) Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
dan/atau
 - d) Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pentahapan menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas sebagai berikut :
 - a) Menyusun rancangan rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan untuk dibahas bersama dengan atasan langsung;
 - b) Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan rancangan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;
 - c) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya;
 - d) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;

- e) Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;
 - f) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang menjadi kewenangan unit kerjanya;
 - g) Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan
 - h) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung
- 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja
 - 4) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
 - 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas :

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten/Kota
- 5) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota

Melalui pelaksanaan aktivitas :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 3) Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota;
- 4) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota;
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 6) Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota;

- 7) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- 8) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- 9) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- 10) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- 11) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 12) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 13) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 14) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 15) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 16) Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

- 17) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 18) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 19) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 20) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 21) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 22) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 23) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 24) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 25) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 26) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- 27) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 28) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 29) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 30) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 31) Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pentahapan menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan;
 - 2) Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - 4) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;
 - 5) Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;

- 6) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas ;
- 7) Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas;
dan
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan langsung
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk
akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana
pada lingkup unit kerja
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif
serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas :
 - 1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah

Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

- 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
- 4) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
- 5) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota
- 6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Melalui pelaksanaan aktivitas :

- 1) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan;
- 3) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota;
- 4) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota;
- 5) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan

- Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal;
- 6) Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan;
 - 7) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan;
 - 8) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan;
 - 9) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
 - 10) Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal;
 - 11) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal;
 - 12) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
 - 13) Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal;
 - 14) Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK);
 - 15) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana;
 - 16) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;
 - 17) Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan;

- 18) Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan;
- 19) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
- 20) Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
- 21) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- 22) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
- 23) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;
- 24) Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain;
- 25) Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota;
- 26) Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB;
- 27) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana;
- 28) Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- 29) Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- 30) Pengendalian Program KKBPK;
- 31) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana;
- 32) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana;

- 33) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
- 34) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
- 35) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- 36) Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
- 37) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB;
- 38) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- 39) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;
- 40) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- 41) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
- 42) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- 43) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP;
- 44) Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi

- (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
- 45) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 - 46) Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB;
 - 47) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - 48) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 49) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak;
 - 50) Peningkatan Kesertaan KB Pria;
 - 51) Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan;
 - 52) Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 - 53) Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan;
 - 54) Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - 55) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
 - 56) Pembinaan Terpadu Kampung KB;
 - 57) Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - 58) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas; dan/atau
 - 59) Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. Pentahapan menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan;
- 2) Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait;
- 4) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;
- 6) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas ;
- 7) Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung

c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja

d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

5. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas :
 - 1) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - 4) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Melalui pelaksanaan aktivitas :

- 1) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan

- Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga);
- 2) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
 - 3) Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL;
 - 4) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - 5) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA));
 - 6) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - 7) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - 8) Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga);
 - 9) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - 10) Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga);
 - 11) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang

- Mendukung Tercapainya iBangga;
- 12) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - 13) Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga);
 - 14) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - 15) Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga);
 - 16) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
 - 17) Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - 18) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);

- 19) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- 20) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja;
- 21) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);
- 22) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);
- 23) Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja;
- 24) Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan;
- 25) Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya;
- 26) Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja;
- 27) Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan;
- 28) Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik

sebaya dan konselor sebaya; dan/atau

29) Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pentahapan menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan;

2) Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;

3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait;

4) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;

5) Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;

6) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas ;

7) Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan

8) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung

c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja

d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif

- serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas :
- 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota
 - 5) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

- peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota
- 6) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota
 - 7) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - 8) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota
 - 9) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota

Melalui pelaksanaan aktivitas :

- 1) Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA;
- 2) Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA;
- 3) Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota;
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota;
- 5) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK;
- 7) Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota;

- 8) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota;
- 9) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/;
- 10) Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- 11) Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota;
- 12) Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
- 13) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 14) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 15) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 16) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 17) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- 18) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 19) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- 20) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 21) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 22) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 23) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 24) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 25) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 26) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 27) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota;

28) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

29) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau

30) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;

31) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;

32) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;

33) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;

34) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; dan/atau

35) Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pentahapan menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas

yang ditetapkan;

- 2) Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - 4) Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;
 - 5) Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;
 - 6) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas ;
 - 7) Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan
 - 8) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan UPTD;
- b. Pelaksanaan kegiatan UPTD;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Peraturan Wali kota Cilegon Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Menyelenggarakan ketatausahaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;

- d. Melaksanakan penyusunan standar dan prosedur pemeriksaan penunjang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Melaksanakan kegiatan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- f. Melaksanakan kegiatan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kasus;
- h. Melaksanakan kegiatan perlindungan korban di penampungan sementara;
- i. Melakukan Mediasi;
- j. Melaksanakan kegiatan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- k. Melaksanakan kegiatan pendampingan korban upaya pemulihan;
- l. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Perlindungan Perempuan dan Anak;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPTD
- o. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPTD;
- q. Menyusun laporan tahunan lingkup UPTD;

- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. UPTD Keluarga Berencana

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas dalam bidang Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugasnya UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan UPTD;
- b. Pelaksanaan kegiatan UPTD;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala UPTD Keluarga Berencana sesuai Peraturan Wali kota Cilegon Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

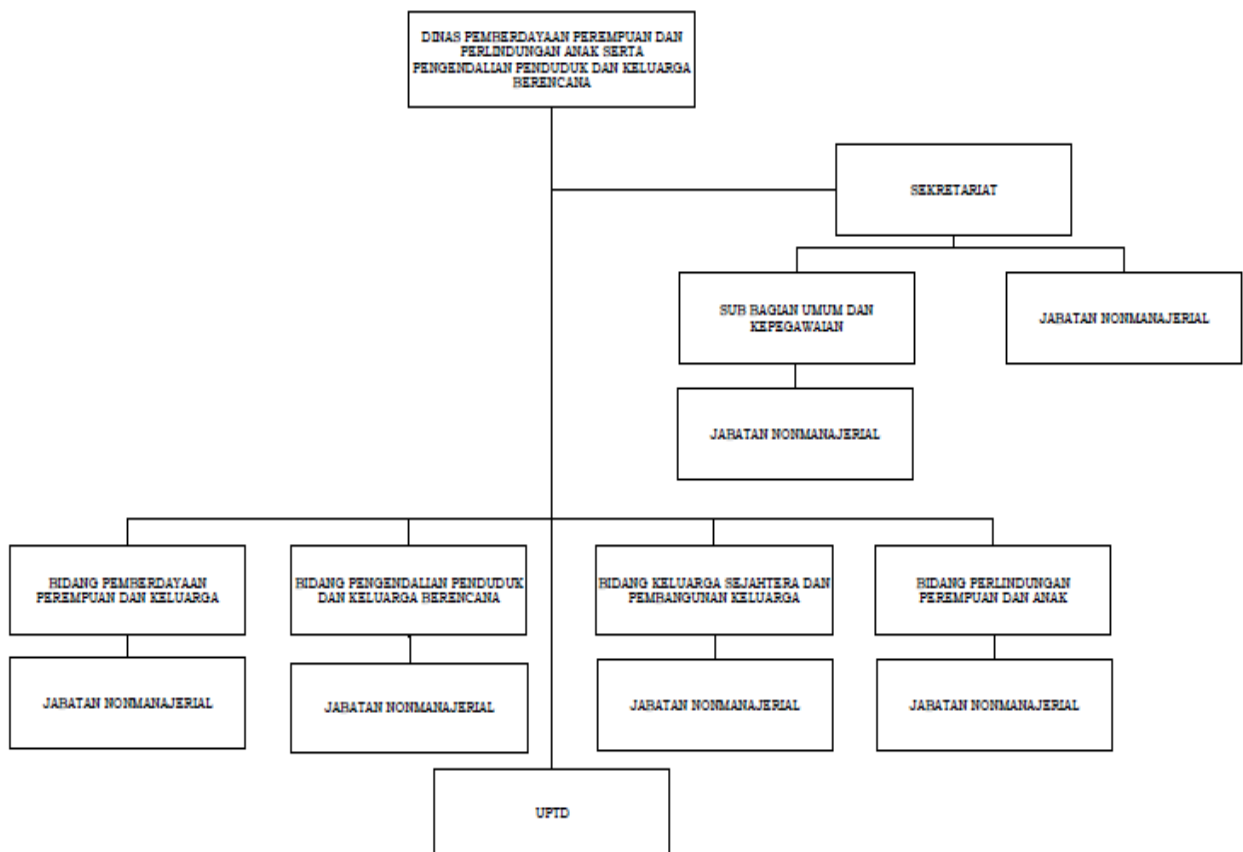
- a. menyusun perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPTD Keluarga Berencana;
- b. merumuskan kebijakan teknis dibidang Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) dan Pelatihan Tenaga Fungsional KKB;

- c. menyelenggarakan ketatausahaan UPTD Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan standar dan prosedur pemeriksaan penunjang Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan kegiatan pendataan dan pengelolaan sistem informasi manajemen dibidang kependudukan, keluarga berencana diwilayah kerjanya, secara terintegrasi;
- f. melaksanakan kegiatan teknis dibidang pengendalian kependudukan sesuai dengan kewenangannya;
- g. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan konsultasi, serta pelaksanaan kegiatan dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di wilayah kerjanya;
- h. menginventarisasi sarana prasarana, permasalahan, dan pemberian rekomendasi bagi pembangunan dibidang kependudukan, keluarga berencana diwilayah kerja;
- i. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, dibidang kependudukan, keluarga berencana diwilayah kerjanya;
- j. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Keluarga Berencana;
- k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPTD
- m. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan;

- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPTD;
- o. menyusun laporan tahunan lingkup UPTD;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 :

Bagan 2.1
Susunan Organisasi DP3AP2KB Kota Cilegon



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon didukung oleh pegawai sebanyak 110 Orang yang terdiri dari PNS, PPPK, PNS BKKBN, PPPK BKKBN, TKK, THL dan Tenaga Kebersihan dengan rincian sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	33 Orang
2	Perempuan	77 Orang
Jumlah		110 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2025

Tingkat Pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	19 Orang

2	Sarjana (S1)	47 Orang
2	Diploma (D4)	1 Orang
3	Diploma (D-3)	11 Orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	32 Orang
Jumlah		110 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2025

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon terdapat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah
1	Golongan IV	13 Orang
2	Golongan III	25 Orang
3	Golongan II	2 Orang
Jumlah		40 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2025

DP3AP2KB memberlakukan Analisis Jabatan dan Kelas Jabatan sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Tujuan Analisis Jabatan adalah menyediakan informasi jabatan dan sebagai dasar untuk merekrut, menentukan rentang gaji dan tingkat atau nilai dan penilaian terhadap kinerja pegawai. Berikut adalah

pembagian kelas jabatan yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan Tahun 2025

No	Kelas Jabatan	Jumlah
1	14 (Empat Belas)	1 Orang
2	12 (Dua Belas)	1 Orang
3	11 (Sebelas)	4 Orang
4	10 (Sepuluh)	5 Orang
5	9 (Sembilan)	4 Orang
6	8 (Delapan)	4 Orang
7	7 (Tujuh)	15 Orang
8	6 (Enam)	2 Orang
9	5 (Lima)	6 Orang
Jumlah		43 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural, pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	10 Orang
2	Fungsional Umum	23 Orang
3	Fungsional Tertentu	10 Orang
Jumlah		43 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Diklat yang diikuti Tahun 2024

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Manajemen Resiko	6 Orang
2	Manajemen Perkantoran Modern	1 Orang
3	Phyton Basic For Data Science	4 Orang
4	Publik Speaking	1 Orang
5	Pengarusutamaan Gender	2 Orang
6	Mediator	2 Orang
Jumlah		16 Orang

Sumber : Bagian Kepegawaian DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Prasarana kantor yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon adalah gedung Kantor, yang berstatus pinjam pakai milik

Pemerintah Kota Cilegon yang berlokasi di Gedung Graha Edhi Praja Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman No.2 Cilegon. Gedung tersebut memiliki Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 Ruang Kepala Dinas, 1 Ruang Sekretaris Dinas, 4 Ruang Kepala Bidang, 1 Ruang Kepala Sub Bagian Umum, 1 Ruang Kerja Fungsional Analis Kebijakan, 1 Ruang Kerja Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, 1 Ruang Kerja Bagian Program, 1 Ruang Kerja Bagian Keuangan, 1 Ruang Kerja Bagian Kepegawaian dan Asset, 10 Ruang Kerja yang tersebar di masing-masing Bidang 1 Aula, 1 Ruang Rapat, 1 Ruang penyimpanan arsip, 2 Ruang Mushola, 1 Pantry, 1 Ruang Menyusui, 1 Ruang Bermain Anak, 1 Gudang Aset, 2 Toilet, Lobby Resepsionis. Selain Gedung kantor di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, terdapat gedung UPT PPA dengan status sewa yang beralamat di Jl. KH.Enggus Arja, No.65 kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan Gudang Alokon, UPT KB, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dengan status sewa yang beralamat di Jl. Lembang 1 No.14. Untuk menunjang Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di siapkan Balai Penyuluh di setiap Kecamatan (8 Kecamatan).

Bagian Asset DP3AP2KB Kota Cilegon memiliki Rencana kegiatan di tahun 2025– 2029. Rencana kegiatan yang dibuat berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menyiapkan dokumen RKB (Rencana Kebutuhan Barang) dan RKP (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang). Bagian asset memberikan format RKB pada setiap bidang untuk diisi sesuai kebutuhan barang setiap bidang kemudian di rekapitulasi dan diseleksi oleh bagian umum.

Mengusulkan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBMMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) ke bagian asset BPKPAD untuk di setuju berdasar kebutuhan setiap bidang dengan menginput di SIAP BMD (Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah).

Mencatat inventaris Barang Milik Daerah dalam bentuk buku penerimaan, buku barang habis pakai, buku pengeluaran, buku pemeliharaan, kartu persediaan, kartu barang, dan buku pengadaan barang inventaris.

Mengamankan Barang Milik Daerah pada pengguna barang dalam bentuk pembuatan SK (Surat Keputusan) pemegang kendaraan dinas, SK pemegang barang inventaris, mencatat perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah, mencatat nomor kontrak, nomor pesanan barang, NPAD, BAST, menerima barang pengadaan kegiatan, mencatat peminjaman Barang Milik Daerah. Mengusulkan pemusnahan Barang Milik Daerah. Pemusnahan Barang Milik Daerah biasanya dilakukan untuk barang yang tidak dapat digunakan lagi. Barang yang akan di musnahkan dilaporkan kemudian di lakukan pemeriksaan fisik oleh bagian BPKPAD.

Mengusulkan pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah biasanya dilakukan untuk barang yang tidak digunakan karena tidak menunjang kegiatan OPD. Barang yang akan dipindahtangkankan dilaporkan kemudian di lakukan pemeriksaan fisik oleh bagian BPKPAD. Menyusun laporan Barang dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB). Kegiatan dilakukan setiap akhir bulan. Ada atau tidak adanya pengadaan barang dicatat sesuai bulan berjalan.

Membuat KIR (Kartu Inventaris Ruangan). Setiap ruangan harus memiliki Kartu Inventaris Ruangan. Kartu ini menunjukkan jenis dan jumlah barang yang ada di ruangan tersebut yang menjadi tanggung-jawab bagian yang bersangkutan. Menyiapkan dan mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB). Menyerahkan barang sesuai Berita Acara Penerimaan Barang. Melakukan *stock opname* barang persediaan. Pemeriksaan dilakukan oleh inspektorat terhadap barang persediaan yang ada di OPD. Melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah. Mencatat dan melaporkan Barang Milik Daerah berdasarkan pengadaan, mutasi atau hibah. Membuat laporan mutasi barang. Membuat pengantar pengajuan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas. Menerima dan memeriksa barang APBD dan APBN (DAK).

Tabel 2.7
Sarana Prasarana DP3AP2KB

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
1	Alat Hiasan	Alat Hiasan		Bingkai	31-12-2017	1
2	Peta	Peta		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2017	1
3	Mikro Bus (Penumpang 13 - 15 orang)	Mikro Bus (Penumpang 13 - 15 orang)	Isuzu/NKR55 CO E2-1 LWB	Isuzu; NKR55 CO E2-1 LWB	31-12-2017	1
4	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	Daihatsu/ Xenia; F601 RV MDF JJ VVTI	Daihatsu; Xenia	31-12-2010	1
5	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)		Toyota; New Avanza Veloz 1.5 M/T	31-12-2013	1
6	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)		Daihatsu; Luxio 1.5 X M/T 3SZ-VE DOHC VVT-i	31-12-2016	1
7	Pick Up	Pick Up		Suzuki; Mobil Box, APV Mega Carry	31-12-2016	1
8	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat		Mitsubishi; Colt Diesel FE 71 BC (4X2) M/T	31-12-2009	1

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
9	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Honda; NF 125 D	31-12-2004	1
10	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Honda; Supra X / NF 100 D	31-12-2005	1
11	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Suzuki; Nex F1 110 NE	31-12-2012	1
12	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Suzuki; UD 110 Next	31-12-2013	1
13	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Suzuki ; FV 110 LE	31-12-2014	6
14	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Honda ; New Vario 125 eSP CBS ISS FI	31-12-2016	2
15	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Honda; Vario 125 CBS ISS	31-12-2017	2
16	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		Olivetti; Line 98	31-12-2004	2
17	Mesin Ketik Longewagen (18)	Mesin Ketik Longewagen (18)		ROYAL; standar	31-12-2013	1
18	Mesin Absen (Time Rekorde)	Mesin Absen (Time Rekorde)		Solution ; X401	31-12-2012	1
19	Lemari Besi/Metal	Lemari Besi/Metal		Elite / -	31-12-2006	2
20	Lemari Besi/Metal	Lemari Besi/Metal		Lion / -	31-12-2009	1
21	Lemari Besi/Metal	Lemari Besi/Metal		Elite / -; 2 Pintu	31-12-2010	1
22	Lemari Besi/Metal	Lemari Besi/Metal		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2014	2
23	Lemari Besi/Metal	Lemari Besi/Metal		VIP; 2 Pintu	31-12-2015	2
24	Filling Besi/Metal	Filling Besi/Metal		Elite; 4 Laci	31-12-2003	1
25	Filling Besi/Metal	Filling Besi/Metal		Elite / -; 4 Laci	31-12-2005	1
26	Filling Besi/Metal	Filling Besi/Metal		Elite / -; 4 Laci	31-12-2008	2
27	Filling Besi/Metal	Filling Besi/Metal		Lion / -	31-12-2009	3

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
28	Filling Besi/Metal	Filling Besi/Metal		Elite / -	31-12-2010	2
29	Filling Besi/Metal	Filling Besi/Metal		Brother / -	31-12-2010	2
30	Filling Besi/Metal	Filling Besi/Metal		Brother / -	31-12-2011	2
31	Filling Besi/Metal	Filling Besi/Metal		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2014	4
32	Filling Besi/Metal	Filling Besi/Metal		VIP; 4 Pintu	31-12-2015	12
33	Rotary Filling	Rotary Filling		Bostinco; Rs- 23-S4	31-12-2012	1
34	Lemari Sorok	Lemari Sorok		Nadera Jaya / -	31-12-2003	2
35	Alat Penyimpanan Lain - Lain	Alat Penyimpanan Lain - Lain		Olympic / -	31-12-2008	1
36	Alat Penyimpanan Lain - Lain	Alat Penyimpanan Lain - Lain		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2010	3
37	Alat Penyimpanan Lain - Lain	Alat Penyimpanan Lain - Lain		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2011	3
38	Papan Visuil	Papan Visuil		Movitex ; DUK BKPP	31-12-2010	1
39	Papan Nama Instansi	Papan Nama Instansi		Plang BKBPP	31-12-2009	1
40	Papan Nama Instansi	Papan Nama Instansi		Plang PIK KRR	31-12-2009	5
41	Papan Pengumuman	Papan Pengumuman		Bilboard ; PPA	31-12-2010	3
42	White Board	White Board		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2006	2
43	Lemari Kayu	Lemari Kayu		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2004	1
44	Lemari Kayu	Lemari Kayu		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2006	5
45	Lemari Kayu	Lemari Kayu		Lemarin TV	31-12-2011	1
46	Lemari Kayu	Lemari Kayu		NADERA; 2 PINTU	31-12-2013	8

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
47	Meja Rapat	Meja Rapat		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2011	1
48	Meja Rapat	Meja Rapat		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2012	2
49	Meja Rapat	Meja Rapat		ORBITREN ; OST1062	31-12-2013	6
50	Kursi Tamu	Kursi Tamu		Mahkota Jati / -	31-12-2009	2
51	Kursi Tamu	Kursi Tamu		Sice / -	31-12-2010	3
52	Kursi Tamu	Kursi Tamu		Sice / -	31-12-2011	4
53	Kursi Putar	Kursi Putar		Ergotec / -	31-12-2003	11
54	Kursi Putar	Kursi Putar		Indachi / -	31-12-2009	6
55	Kursi Putar	Kursi Putar		Ergotek; 601	31-12-2016	8
56	Kursi Putar	Kursi Putar		Ergotec; Tipe 601	31-12-2017	10
57	Kursi Lipat	Kursi Lipat		Chitose / -	31-12-2009	44
58	Kursi Lipat	Kursi Lipat		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2010	9
59	Kursi Lipat	Kursi Lipat		Chitose / -	31-12-2011	108
60	Meja Komputer	Meja Komputer		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2009	1
61	Meja Komputer	Meja Komputer		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2011	3
62	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		1 Biro	31-12-2003	1
63	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		1/2 Biro	31-12-2005	3
64	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		Activ / -; 1/2 Biro	31-12-2008	1
65	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		1/2 Biro	31-12-2009	32

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
66	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		1 Biro	31-12-2009	1
67	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		1/2 Biro	31-12-2010	11
68	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2011	1
69	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		Karisma; 1 Biro	31-12-2016	10
70	Sofa	Sofa		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2014	1
71	Lemari Es	Lemari Es		LG ; 2 Pintu	31-12-2009	1
72	Lemari Es	Lemari Es		Toshiba ; 2 Pintu	31-12-2010	1
73	AC Split	AC Split		TCL; 1 PK	31-12-2009	1
74	AC Split	AC Split		TCL; 2 PK	31-12-2009	2
75	AC Split	AC Split		Sharp; 1 PK, AH-A9SEY	31-12-2016	5
76	Televisi	Televisi		LG / -; 26	31-12-2009	1
77	Sound System	Sound System		Speaker Active	31-12-2009	1
78	Dispencer	Dispencer		Sanken / -	31-12-2009	2
79	Dispencer	Dispencer		Sanken; Utopia HWD 760	31-12-2015	2
80	Dispencer	Dispencer		Sanken; HWD 772SH	31-12-2016	2
81	Handy Cam	Handy Cam		Sony; HDR- PJ200E	31-12-2014	1
82	Handy Cam	Handy Cam		Panasonic; HC-W570	31-12-2016	1
83	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	Alat Rumah Tangga Lain - Lain		Figura / -	31-12-2009	1
84	Personal Computer Unit (PC)	Personal Computer Unit (PC)		Intel ; Pentium IV	31-12-2010	1

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
85	Personal Computer Unit (PC)	Personal Computer Unit (PC)		Lenovo	31-12-2012	6
86	Personal Computer Unit (PC)	Personal Computer Unit (PC)		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2012	1
87	Personal Computer Unit (PC)	Personal Computer Unit (PC)		Lenovo; Q190	31-12-2013	1
88	Personal Computer Unit (PC)	Personal Computer Unit (PC)		Lenovo; H520S	31-12-2013	2
89	Personal Computer Unit (PC)	Personal Computer Unit (PC)		Lenovo; PC All In One, Intel Pentium Dual Core	31-12-2015	4
90	Laptop	Laptop		Hp ; Compaq T5870	31-12-2010	2
91	Laptop	Laptop		Hp ; Compaq	31-12-2010	1
92	Laptop	Laptop		Dell ; Dual Core P6200- 2.13 Ghz	31-12-2011	1
93	Laptop	Laptop		Lenovo; G40- 45	31-12-2014	5
94	Laptop	Laptop		Dell; Inspiron 3458 Intel Core i3-5005U	31-12-2016	7
95	Laptop	Laptop		HP; Probook 440G3	31-12-2016	1
96	Laptop	Laptop		HP; Probook 440 G2	31-12-2016	1
97	Laptop	Laptop		HP	31-12-2017	1
98	Note Book	Note Book		Asus; N46VZ	31-12-2013	1
99	Printer	Printer		HP ; Laser Jet 1020	31-12-2007	1
100	Printer	Printer		Epson; LQ 2180	31-12-2007	1
101	Printer	Printer		HP; Laser Jet P1505	31-12-2009	1
102	Printer	Printer		HP / -	31-12-2010	1

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
103	Printer	Printer		Epson; Stylus T11	31-12-2010	3
104	Printer	Printer		Canon ; Pixma 426	31-12-2011	1
105	Printer	Printer		Epson ; TX 121	31-12-2011	2
106	Printer	Printer		HP ; Laser Jet P1102	31-12-2012	1
107	Printer	Printer		Epson; TX121X	31-12-2013	1
108	Printer	Printer		Canon; MP237	31-12-2013	1
109	Printer	Printer		Epson; XP - 30	31-12-2014	3
110	Printer	Printer		Epson; Inkjet L120	31-12-2016	4
111	Printer	Printer		Epson; Inkjet Multifunction K300	31-12-2016	1
112	Printer	Printer		Canon ; Pixma MP287	31-12-2017	8
113	External	External		axioo; 500 GB	31-12-2012	1
114	Peralatan Jaringan Lain - Lain	Peralatan Jaringan Lain - Lain		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2012	1
115	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		Kharisma; 1 Biro	31-12-2014	10
116	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis		Lion / -	31-12-2009	2
117	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis		Elite / -	31-12-2010	4
118	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis		Brother ; 2 Pintu	31-12-2011	2
119	Proyektor + Attachmen	Proyektor + Attachmen		PANASONIC; PT LB2VEA	31-12-2013	1
120	Proyektor + Attachmen	Proyektor + Attachmen		Sony; Vpl-DX 120	31-12-2014	1
121	Proyektor + Attachmen	Proyektor + Attachmen		Sony; VPL-DX 122 SYQ.VPLDX1	31-12-2015	1

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
				22/C1 100-240 V		
122	Proyektor + Attachmen	Proyektor + Attachmen		Infocus; In 224	31-12-2016	1
123	Proyektor + Attachmen	Proyektor + Attachmen		NEC; NP-MC371 XG	31-12-2016	1
124	Microphone/Wireless Mic	Microphone/Wireless Mic		Sony; AK-88	31-12-2016	1
125	Microphone/Wireless Mic	Microphone/Wireless Mic		Shure; ULX-4	31-12-2016	2
126	Camera Electronic	Camera Electronic		Canon / -	31-12-2007	1
127	Camera Electronic	Camera Electronic		Canon	31-12-2010	1
128	Camera Electronic	Camera Electronic		Nikon	31-12-2012	1
129	Camera Electronic	Camera Electronic		Canon ; lrus HS 240	31-12-2012	2
130	Camera Electronic	Camera Electronic		Canon; lrus HS 1000	31-12-2012	1
131	Camera Electronic	Camera Electronic		Canon; SLR EOS 600D	31-12-2014	1
132	Camera Electronic	Camera Electronic		Nikon; 1 V2 Double Zoom Kit	31-12-2015	1
133	Camera Electronic	Camera Electronic		Canon; EOS 1200D	31-12-2016	1
134	Loudspeaker	Loudspeaker		Ashley; Speaker Wireless PA10M	31-12-2016	1
135	Loudspeaker	Loudspeaker		Alcort; Portable Nirkabel PA System	31-12-2016	2
136	Sound System	Sound System		Professional ; DX12	31-12-2015	1
137	Faksimile	Faksimile		Sharp / -	31-12-2010	1
138	Faksimile	Faksimile		Panasonic; KX-FT 983 CX	31-12-2015	1
139	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Alat Komunikasi Telephone Lainnya		Samsung; Tab (Galaxy TAB A SM - P355)	31-12-2017	20

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
140	Alat Kedokteran Umum Lainnya	Alat Kedokteran Umum Lainnya		Obgyn Bed	31-12-2017	2
141	Alat Kedokteran KB Lainnya	Alat Kedokteran KB Lainnya		IUD KIT	31-12-2017	1
142	Meja Kerja	Meja Kerja		Kharisma; 1 Biro	31-12-2015	8
143	Papan Alfabet	Papan Alfabet		Movitek ; Struktur BKBPP	31-12-2009	1
144	Rak Kayu	Rak Kayu		Rak Koran Gantung	31-12-2010	1
145	Kursi Rapat	Kursi Rapat		Phoenix	31-12-2015	50
146	Kursi Lipat	Kursi Lipat		Chitose	31-12-2003	4
147	Kursi Lipat	Kursi Lipat		Phoenix	31-12-2009	12
148	Alat Hiasan	Alat Hiasan		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2014	10
149	Alat Hiasan	Alat Hiasan		Bingkai KIR	31-12-2015	1
150	Alat Hiasan	Alat Hiasan		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2014	5
151	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	Alat Rumah Tangga Lain - Lain		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2011	10
152	Hub	Hub		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2012	1
153	Rambu Tidak Bersuar Lainnya	Rambu Tidak Bersuar Lainnya		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2014	2
154	Rambu Papan Tambahan	Rambu Papan Tambahan		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2016	2
155	Rambu Papan Tambahan	Rambu Papan Tambahan		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2017	9
156	Rambu Papan Tambahan	Rambu Papan Tambahan		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2016	8
157	Rambu Tidak Bersuar Lainnya	Rambu Tidak Bersuar Lainnya		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2011	5
158	Rambu Tidak Bersuar Lainnya	Rambu Tidak Bersuar Lainnya		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2012	1

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
159	Printer (Epson, LQ 2190 Dot Matrix)	Printer (Epson, LQ 2190 Dot Matrix)		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2018	1
160	Plang Forum Anak (8 Kelurahan)	Plang Forum Anak (8 Kelurahan)		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2018	8
161	Obgyn Bed	Obgyn Bed		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2018	2
162	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro		1/2 Biro	31-12-2009	4
163	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)	Minibus (penumpang 14 orang kebawah)		Toyota ; All New Kijang Inova G A/T LUX	31-12-2016	1
164	Kursi Rapat	Kursi Rapat		Futura	31-12-2010	10
165	Meja Rapat Kecil	Meja Rapat Kecil		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan :	31-12-2018	1
166	P.C Unit	P.C Unit		Merk : Lenovo; Tipe/Model : ; Bahan : Formika	31-12-2019	3
167	Printer	Printer		Merk : Epson; Tipe/Model : ; Bahan : Formika	31-12-2019	5
168	P.C Unit	P.C Unit		Merk : Asus; Tipe/Model : ; Bahan : Formika	31-12-2019	2
169	Lap top	Lap top		Merk : HP; Tipe/Model : ; Bahan : Formika	31-12-2019	1
170	Printer	Printer		Merk : Epson; Tipe/Model : L3110; Bahan : Formika	31-12-2019	2
171	Mobil Unit Penerangan KB	Mobil Unit Penerangan KB		Merk : Mitsubishi Strada; Tipe/Model : Strada Triton DC GLS; Bahan : Besi	31-12-2019	1
172	Layar Infocus	Layar Infocus		Merk : ; Tipe/Model : ; Bahan :	31-12-2019	1
173	Infocus	Infocus		Merk : ; Tipe/Model : ; Bahan :	31-12-2019	1
174	AC	AC		Merk : Daikin; Tipe/Model : 1	31-12-2019	4

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
				PK; Bahan : Formika		
175	Papan Hibauan (BilBoard)	Papan Hibauan (BilBoard)		Merk : ; Tipe/Model : Billboard; Bahan : Besi	31-12-2019	3
176	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 4		Merk : Mitsubishi; Tipe/Model : XPander Sport 1.5L A/TBahan : Besi	31-12-2019	2
177	Mesin Scanner	Mesin Scanner		Merk : Brother ; Tipe/ Model : ADS-2200; Bahan : Formika	31-12-2019	1
178	brandkas	brandkas		Merk : Viper; Tipe/ Model : 50EL; Bahan : besi	31-12-2019	1
179	Meja Kerja Staff	Meja Kerja Staff		Merk : ; Tipe/ Model : ; Bahan : Kayu	31-12-2019	1
180	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		Merk: Horse Metal, Tipe/Model: MTP 02, Bahan: Bahan Kayu atas kaca	18-02-2020	3
181	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		Merk: Ergotec, Tipe/Model: LX 925, Bahan: Oscar, Hydrolic	18-02-2020	3
182	Lemari Besi/Metal	Lemari Besi/Metal		Merk: Alba, Tipe/Model: SDG 206/ Pintu sliding kaca 3 Rak, Bahan: Metal/Kaca	18-02-2020	1
183	Printer	Printer		Merk: Epson, Tipe/Model: L3110, Bahan: Formika	09-11-2020	3
184	Lemari Es	Lemari Es		Merk: Sharp, Tipe/Model: SJ-456 gi-AM/ 2 Pintu, Bahan: Formika	09-11-2020	1

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
185	Sepeda Motor	Sepeda Motor		Merk: Yamaha, Tipe/Model: , Bahan: Besi	25-09-2020	10
186	Thermogun	Thermogun		Flus IR-805 Infrared Thermometer	18-05-2020	1
187	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Mesin ketik manual portable		M2000Tr Mesin Ketik Tik Manual 13" Inc Japan Made Product Mesin Tik	30-04-2021	4
188	Lap Top	Lap Top		Core i7, 16 GB, Win 10	17-09-2021	3
189	Lap Top	Lap Top		Aspire A 314	17-09-2021	3
190	P.C Unit	P.C Unit		PC Intel Core i3 Haswell plus Monitor Led 19"	17-09-2021	6
191	LCD Projector/Infocus	LCD Proyektor		5000-3800 Lumen, 1024x798 XGA, 4:3 Ratio, 15000:1 Contrast ratio	23-08-2021	1
192	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer		Printer All In One	23-08-2021	2
193	P.C Unit	P.C Unit		Minimal i7- 8700 4,6 Ghz, 8-16 Gb Ram, 1 TB 7200 Rpm Hardisk, Hd graphics 630, 21,5 Inch Monitor, Windows 10 Pro 64 Bit	23-08-2021	3
194	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 biro		Bahan partikel board laminasi, PVC ukuran 120x60x75 dilengkapi 1 laci dan 2 lemari gantung	21-04-2021	23

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
195	Kursi Lipat	Kursi Lipat		Chitose yamato HAA/HNN, dimension WxDxH(mm) : 449x518x813 Seat height (mm) : 458, frame color:chrome	21-04-2021	37
196	Sofa	Sofa		Kayu jati, kulit sintetis	21-04-2021	2
197	Kursi Tamu	Kursi tamu		Kayu jati, kulit sintetis	21-04-2021	1
198	Kursi Putar	Kursi Putar		Bhn kaki :chromeBhn kursi:Mesh/jaring ada fitur hidrolis naik turunBhn dudukan sponge berkualitas	21-04-2021	5
199	Meja Kerja Kayu	Meja kerja kayu		Uk pxlxt: 120x60x72,5 cmBahan partikel board lapis paper system knockdown	21-04-2021	1
200	Kursi Putar	Kursi stool		Kursi stylis hidrolik, bahan stenlis	21-04-2021	1
201	Meja Resepsionis	Meja resepsionis		Bahan: Kayu multiplek Polywood 18mmTaco sheetFinishing lainnya: HPL taco/HPL natural Duco	21-04-2021	1
202	Microphone/Wireless MIC	Speaker wireless		Wireless portable, POWER SUPPLY AC 220 V; Loudspeaker 15 Inch; Battery: 12V 14 AH; Material :plastic, dimens 50.543.576.5 cm	05-08-2021	2

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
203	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Scanner		iX500	09-08-2021	3
204	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Inject		Funcion: print, scan, copy	09-08-2021	6
205	A.C. Split	A.C Split		1/2 PK	08-12-2021	3
206	A.C. Split	A.C Split		2 PK	08-12-2021	1
207	Kipas Angin	Kipas Angin		Cosmos	08-12-2021	6
208	Vertikal Blind	Vertikal Blind (Gorden)		Vertikal Blind (1,0 meter x 1.475.000)	08-12-2021	3
209	Vertikal Blind	Vertikal Blind (Gorden)		Vertikal Blind (7,4 meter x 1.475.000)	08-12-2021	4
210	Vertikal Blind	Vertikal Blind (Gorden)		Vertikal Blind (2,8 meter x 1.475.000)	08-12-2021	9
211	Vertikal Blind	Vertikal Blind (Gorden)		Vertikal Blind (10,8 meter x 1.475.000)	08-12-2021	1
212	Vertikal Blind	Vertikal Blind (Gorden)		Vertikal Blind (2,6 meter x 1.475.000)	08-12-2021	1
213	Vertikal Blind	Vertikal Blind (Gorden)		Vertikal Blind (1,4 meter x 1.475.000)	08-12-2021	1
214	P.C Unit	Personal Komputer		Lenovo; H500s	31-12-2014	5
215	External/ Portable Hardisk	External / portable hardisk		Seaget 2 Terra	01-04-2022	4
216	Mesin Hitung Elektronik/Calcul ator	Mesin Hitung Elektronik		SL 220 Te 12 Digit Original	01-04-2022	2
217	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 biro		Meja Kantor Expo MT MTM-3001 BEECH (120cm)	18-04-2022	9
218	Sofa	Sofa		Shelby set 321p	18-04-2022	2
219	Kursi Putar	Kursi Putar		Kursi putar nylon footbase, kursi putar kantor hidrolik	18-04-2022	5

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
220	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Lemari buku Pejabat Eselon III		Best RC LHS0704 Lemari kaca rak buku pajangan multifungsi	18-04-2022	1
221	P.C Unit	P.C Unit		PC All 8 GB 1 TB WiFi + LAN intel core i5	19-12-2022	1
222	Tablet PC	Tablet		Samsung Galaxy Tab S7	19-12-2022	1
223	Lap Top	Lap Top		Hp Spectre x360 touchscreen	19-12-2022	3
224	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer		Printer Multifungsi, Ink Tank System, Fungsi : Print, Scan, dan Copy Fitur : WiFi Direct, Kecepatan Print hingga 33/15 ppm	19-12-2022	4
225	Papan Visual/Papan Nama	Papan Visual/Papan Nama		Kayu Melamin, Polywood	01-02-2023	1
226	Televisi	Televisi		Google TV LED 55" UHD	18-08-2023	1
227	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 biro		Expo meja kantor expo MT MTM-3001 BEECH (120cm)	23-10-2023	10
228	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer		Epson Ecotank L3210	03-10-2023	3
229	Rak Besi	Rak Besi		Rak Buku Perpustakaan	21-08-2023	1
230	External/ Portable Hardisk	External/Portable Hardisk		Portable SSD 1 TB Sandisk Extreme	21-08-2023	2
231	Lap Top	Lap Top		Lap top i5 Acer Travelmate P214 Ram 8GB SSD 512GB	13-10-2023	8
232	Lap Top	Lap Top		Laptop i5 Travelmate P214 Ram	03-10-2023	2

No.	Nama Barang	Nama Spesifik	Merk / Type	Spesifikasi	Tanggal Perolehan	Ket
				8GB SSD 512GB		
233	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer		Epson Ecotank L3210	11-12-2023	1
234	Lap Top	Lap Top		Processor Apple M1 8-core CPU and 8-core GPU Memory 8GB SSD 256GB	11-12-2023	2
235	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Portable Air Conditioner		AC Floor Standing Inverter R32 5 PK	06-12-2023	2
236	Kursi Putar	Kursi Putar		Kursi putar Nylon footbase osaka gap unokursi putar kantor hidrolik, SKY 1 net INVITI	09-10-2023	10
237	Hukum	Buku PP No. 27 Tahun 2014			31-12-2016	1
238	Hukum	Buku Permendagri No. 19 Tahun 2016		Pedoman Pengelolaan BMD	31-12-2016	1
239	Barang Kerajinan Lainnya				31-12-2004	4
240	Software	Aplikasi		Grand Desain Pembangunan Kependudukan	05-12-2022	1

Sumber : Bagian Aset DP3AP2KB Kota Cilegon tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak). Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pelayanan maka yang menjadi acuan adalah Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara akumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan penunjang pemerintahan pada periode pelaksanaan Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2021-2026 berada pada trend yang positif, walaupun untuk setiap tahun pelaksanaan cenderung bersifat fluktuatif yang tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Target dan Capaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2020 - 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Renstra Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan profesionalitas aparatur	Nilai LA KIP Peringkat Daerah		B	69	69,00	70,00	70,00	B	70,55	69,94	71,10	68,18	100	102,25	101,36	101,57	97,40

No.	Tujan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama Tugas dan Fungsi	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Renstra Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2			Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah		0	55	55,8	58,0	75	0	53,74	71	72,21	72,85	0	97,71	127,24	124,5	97,13
3			Indeks Kepuasan Masyarakat		0	78	77	79	80	0	86,47	86,47	90,63	94,47	0	110,86	112,29	114,72	118,09
4	Peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga	Persentase Pencapaian 24 Indikator Kota Layak Anak		70	60	100	85	15	68,3	77	100	69	15	97,57	128,33	100	81,18	100
5			Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6			Persentase Keluarga Binaan yang Meningkatkan		15	80	80	82	0	16,52	73	100	82	0	110,13	91,25	125	100	0

No.	Tujan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama Tugas dan Fungsi	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Renstra Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			Kualitasnya																
7			Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk		2,5	2,0	1,90	0,89	0,63	0,92	1,05	-1,28	0,63	1,1	36,8	52,50	-67,37	70,79	174,60
8			Rata-rata Persentase Capaian Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB		67	76,86	100	100	100	79,26	76,86	70	99,49	115,45	118,29	100	70	99,49	115,45
9			Persentase Anggota BK B, BK R, BK L dan UP PK A/UP PK S yang Ber-KB		10295	85,53	86,53	86	0	5145	87,19	86,32	86	0	49,98	101,94	99,76	100	0
10			Persentase OPD yang Mel		5	20	30	40	50	3,95	92	63,89	100	100	79	460	212,97	250	200

No.	Tujan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Renstra Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			aksan akan Anggaran Responsif Gender																
11			Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Mengikuti Skala Usaha lainnya		80	25	30	30	35	80	18,66	22,46	-	40	100	74,64	74,87	-	114,29
12			Persentase Anggota Organisasi Perempuanyang Berpartisipasi Aktif dalam Pelaksanaan Program		35	100	100	100	100	100	92,3	100	100	100	285,71	92,3	100	100	100
13			Rasio Keterasan Terhadap Perempuan		100	38/100.000	36	36	29,30	100	76/100.000	36,84	29,3	26,13	100	200	102,33	81,39	89,18

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Renstra Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			puan terkmasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan puan)																
14			Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak		0	0	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100	0	100

Sumber : Renstra dan Renja DP3AP2KB

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja pelayanan bervariasi. Hampir semua indikator menunjukkan peningkatan capaian. Namun pada Indikator Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak terdapat nilai 0 hal ini disebabkan pada tahun tersebut(tahun 2023) tidak mendapatkan anggaran sehingga tidak dilakukan kegiatan dan Indikator Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak baru dimulai pada tahun 2022.

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada tujuan/sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tingkat efisien. Sasaran 1 (satu) Meningkatnya Akuntabilitas

Pemerintah dan Profesional Aparatur mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,21 dan sasaran 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,41.

Tabel 2.9

Rencana Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2020 - 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke (juta)					Realisasi Renstra Tahun Ke (juta)					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Kualitas layanan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA		4488000000	1129442000	1256440000	1317943000	13317000	4090221670	1023031230	1090937584	1100375422	113205422	92,61	91,54	95,51	99,38	90,96
2	Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak dan Keluarga	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2088200000000000	1645000000000000	1633000000000000	1639000000000000	1600000000000000	202710301074	2263569153	388613245	217807000	217688	96,48	1381,47	2646,19	133,87	1022,90
3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		0000000000000000	3400000000000000	5000000000000000	7000000000000000	9550000000000000	0000000000000000	383114691090	41158926000000	2955000000	52880000	0,00	1126,81	82,29	39,44	55,68
4			PROGRAM KUALITAS KELUARGA		0000000000000000	4620000000000000	5280000000000000	5122000000000000	5112000000000000	0000000000000000	5208906088	927544791200	4441900000	40012000	0,00	119,74	175,95	92,87	78,41
5			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK		0000000000000000	0000000000000000	8000000000000000	1200000000000000	1200000000000000	0000000000000000	350204710	1508037400	250490500	86549000	0,00	NA	187,55	215,08	72,12
6			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		0000000000000000	0000000000000000	1500000000000000	4000000000000000	4000000000000000	0000000000000000	271298491	803740000	567690900	267690900	0,00	NA	535,99	132,43	66,92
7			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		0000000000000000	0000000000000000	2000000000000000	2000000000000000	2000000000000000	0000000000000000	0094700	0524700	025000	494925000	0,00	0,00	102,65	NA	24,75

Pemberdayaan Perempuan (tingkat efisiensi 0,60) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (tingkat efisiensi 0,59).

Capaian kinerja program/kegiatan berada pada tingkat efisien karena mencapai nilai 1 yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (tingkat efisiensi 1,61), Program Peningkatan Kualitas Keluarga (tingkat efisiensi 1,12), Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (tingkat efisiensi 1,01), Program Pemenuhan Hak Anak (tingkat efisiensi 1,50), Program Perlindungan Khusus Anak (tingkat efisiensi 1,58), Program Pengendalian Penduduk (tingkat efisiensi 1,04), Program Pembinaan Keluarga Berencana (tingkat efisiensi 1,22), UPTD Pelayanan PPA (tingkat efisiensi 1,42), UPTD Pelayanan KB (tingkat efisiensi 1,01).

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon. Kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut. Hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon selama Periode Tahun 2020- 2024, yaitu sebagai berikut :

Target indikator kinerja yang tidak terealisasi disebabkan oleh pendokumentasian dari setiap kegiatan belum optimal sehingga ketika dilakukan evaluasi oleh instansi terkait yang berwenang dalam evaluasi menunjukkan nilai

yang tidak optimal. Bukti dukung adalah poin yang sangat penting dalam penilaian suatu pencapaian. Jika tidak dapat menunjukkan bukti dukung maka dianggap kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini terjadi karena adanya pengabaian ataupun penundaan dalam menyusun laporan kegiatan sehingga bukti dukung tidak terdokumentasi dengan baik.

Upaya untuk menyelesaikan kendala yang ada diantaranya dengan tetap melakukan koordinasi dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan, optimalisasi tim kerja dan penentuan tugas masing masing tim sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat terdokumentasikan dengan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu perlunya dibuat Rencana Tindak Lanjut dan Rencana Aksi setiap Program/Kegiatan akan memudahkan dalam perencanaan untuk masa yang akan datang.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon adalah seluruh masyarakat Kota Cilegon yang membutuhkan dan mendapatkan layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon. Berikut penjelasan secara terperinci kelompok sasaran layanan dari setiap bidang :

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan pelayanan berupa Pelayanan Mobil Cinta Keluarga Peduli Stunting (Mocuga Penting) (Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang berbagai topik, seperti program pemerintah, kebijakan publik, atau isu-isu social), Penyuluhan dan

Edukasi (Memberikan informasi tentang pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga sejahtera), Pelayanan Kontrasepsi (Menyediakan akses terhadap berbagai jenis alat kontrasepsi, baik melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan KB keliling), Pendataan dan Pemantauan Keluarga (Melakukan pendataan keluarga secara berkala untuk mengetahui kondisi demografi dan kebutuhan layanan KB di masyarakat), Program Kampung Keluarga Berkualitas (Mengintegrasikan berbagai program Pembangunan berbasis keluarga ditingkat Kelurahan), Penanganan Stunting dan Gizi Keluarga (Melalui program seperti DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), bidang ini juga mendukung peningkatan gizi keluarga dan pencegahan stunting), Pembinaan Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) (Melatih Pengelola Fasyankes yang teregister ke SIGA), Pembinaan dan Pemberdayaan Kader (Membina Kader KCM, Kader IMP/Sub IMP dan masyarakat agar dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya).

Penerima layanan diatas adalah Masyarakat, Keluarga, PUS (Pasangan Usia Subur); OPD terkait program Kampung KB, Penyuluh KB, Kecamatan, Kelurahan, Pokja Kampung KB, Pengurus Rumah Data Kependudukan; PKK, Pengelola DASHAT, Baduta/Balita, Ibu hamil; KCM, Kader IMP/Sub IMP; Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

Data yang dihasilkan sangat diperlukan oleh Pemerintah (BKKBN, Dinkes, Bag. Organisasi Setda, Bappedalitbang, Inspektorat); Lembaga Penelitian dan Akademisi (Mahasiswa/i yang melakukan penelitian); Masyarakat.

Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga yang saat ini menjadi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) memiliki layanan yaitu Satyagatra (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) berupa layanan konsultasi dan konseling mengenai permasalahan atau pengelolaan keluarga; Kegiatan Pembinaan Ketahanan

Keluarga berupa sosialisasi dan pembinaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA) untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam berbagai aspek; PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) berupa layanan satu pintu holistik dan berbasis hak anak yang bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; Program Peningkatan Kualitas Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak (P2WKSS) berupa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen peserta dalam upaya pencegahan diskriminasi dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Layanan Bidang KSPK diterima oleh Keluarga yang memiliki Balita, Keluarga yang memiliki Remaja, Keluarga yang memiliki Lansia, Calon pengantin, Ibu hamil, ibu menyusui. Data yang dihasilkan oleh Bidang KSPK dibutuhkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota Cilegon dan stakeholder lainnya seperti BPS, Bapperida, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik.

Bidang Pengarusutamaan gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memberikan layanan berupa pemberian fasilitasi dan konsultasi terkait pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Penerima layanan adalah organisasi perempuan, OPD. Data yang dihasilkan diperlukan oleh seluruh OPD. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 Bidang Pengarusutamaan gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (PPK).

Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, Pengelola Sistem Data (PHAPKAPSD) memberikan layanan berupa sosialisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) dalam pencegahan KtP (Kekerasan terhadap Perempuan), KtA (Kekerasan terhadap Anak), TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Perkawinan Anak, Seminar parenting untuk anak disabilitas. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon

Nomor 11 Tahun 2025 Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, Pengelola Sistem Data (PHAPKAPSD) menjadi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pelayanan pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dalam Melayani Kekerasan terhadap perempuan dan anak selain bekerjasama dengan para ahli seperti psikolog dan rohaniawan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon bekerjasama dengan PATBM di seluruh kelurahan, Kepolisian, Kejaksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon khusus menangani korban kekerasan fisik. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon memiliki data yang dibutuhkan oleh beberapa stakeholder diantaranya yaitu Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cilegon, BPS Kota Cilegon, BKKBN Perwakilan Provinsi Banten, DP3AKKB Provinsi Banten.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan adalah Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
DP3AP2KB Kota Cilegon

NO	URUSAN	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya penatalaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih ada Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	<p>a. Masih adanya kesenjangan antara peran perempuan dan laki-laki dibidang ekonomi, sosial, hukum, politik, pendidikan</p> <p>b. Kurang Responsifnya instansi terkait dan stakeholder terhadap program-program perlindungan perempuan dan anak</p> <p>c. Belum optimalnya pembinaan tentang perlindungan perempuan</p> <p>d. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak</p> <p>e. Belum optimalnya penggunaan Sistem informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)</p> <p>f. Masih kurangnya ketersediaan tenaga terlatih dalam pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap anak</p> <p>g. Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan dari tingkat Aparat Penegak Hukum (APH)</p> <p>h. Angka Pernikahan dini masih cukup banyak</p>
			Belum optimalnya layanan pusat	a. Masih kurangnya ketersediaan tenaga ahli profesional layanan

NO	URUSAN	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			pembelajaran keluarga	pengaduan keluarga b. Belum optimalnya fasilitas layanan konsultasi dan konseling keluarga serta sarana prasarana penunjang layanan
2	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya penatalaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	a. Belum Optimalnya Peran serta masyarakat dalam memanfaatkan program Keluarga Berencana b. Belum terpenuhinya PKB/PLKB secara proporsional di masing-masing wilayah c. Belum maksimalnya penyuluhan tentang stunting d. Perlunya peningkatan Kualitas tenaga penyuluh secara profesional e. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKA

Sumber : Pemetaan RPJMD Kota Ciegoon Tahun 2025 - 2029

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon berdasarkan beberapa telaahan berikut :

1. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon berpedoman pada Visi dan Misi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2029. Pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan Visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2029

yaitu:“ **MEWUJUDKAN CILEGON YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN** ”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Cilegon tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dicapai oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui 6 (Enam) misi dan misi ini menjadi Prioritas Daerah (PD) di Kota Cilegon dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun misi tersebut yaitu :

1. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas
2. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif
3. Meningkatkan akses layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas dan terjangkau
4. Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif
5. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan melestarikan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon membidangi 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai pemetaan RPJMD Kota Cilegon maka misi yang diampu adalah :

- a. **Misi 1 : Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk memastikan**

akses yang merata dan berkualitas dengan program pembangunan yang dilaksanakan yaitu PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA, PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK, PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- b. **Misi 3 : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas dan terjangkau** dengan program pembangunan yang dilaksanakan yaitu PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- c. **Misi 6 : Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat** dengan program pembangunan yang dilaksanakan yaitu PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK, PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK, PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

2. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pembangunan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup Kabupaten/Kota tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian atau Lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kebijakan jangka menengah Kementerian/Lembaga yang dioperasionalkan ke dalam sasaran jangka menengah yang hendak dicapai merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah daerah untuk mensinergikan sasaran jangka menengah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 berdasarkan Visi dan Misi serta kondisi dan isu-isu strategis lainnya yang berkembang.

Visi RPJMN tahun 2020-2024 adalah : **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”** dengan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 terdapat 5 (lima) arahan utama sebagai strategi. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yang diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, yang diarahkan untuk menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama

menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, yang diarahkan untuk memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yang diarahkan untuk melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima strategi tersebut selanjutnya diuraikan kedalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai arah kebijakan pembangunan, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Keselarasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Misi : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- Arah : Pembangunan SDM
- Strategi : Peningkatan Layanan Dasar Dan Perlindungan Sosial
- Sasaran :
 - Meningkatnya Indeks Perlindungan Anak
 - Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga
 - Meningkatnya median usia kawin pertama Perempuan
- Agenda : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Arah Kebijakan : Pengendalian penduduk dan penguatan tata publik kependudukan
Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda

2. Urusan Penunjang Pemerintahan

- Misi : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- Arah : Penyederhanaan Birokrasi
- Strategi : Penyelenggaraan E-Government

- Sasaran : Meningkatnya Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/menggambarkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi dan layanan publik pemerintah
- Agenda : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Arah : Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik
- Kebijakan : berkualitas

Visi dan misi RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renstra Kementerian Tahun 2020-2024. Kementerian/Lembaga Negara setingkat Kementerian yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Visi dan Misi Kemenpppa sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 adalah **“KemenPPPA yang Profesional, Ekual,**

Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong” .

Berdasarkan telaahan atas visi dan misi KemenPPPA, maka Misi yang dapat diselaraskan sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu; dan
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPHPA

Visi dan Misi tersebut memperhatikan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Tujuan KemenPPPA yang dapat diselaraskan adalah terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, dengan sasaran strategis berupa meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan indonesia ramah perempuan dan layak anak dengan sasaran strategis berupa melalui indikator kinerja sasaran strategis berupa Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif, dan Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA);

Demikian pula halnya dengan arah kebijakan dan strategi yang ditempuh KemenPPPA dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di berbagai Bidang Pembangunan, dengan *strategi* :

- a. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG);
- b. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dalam kepemimpinan dan politik, sosial, serta ekonomi dan ketenagakerjaan;
- c. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah;

2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, dengan strategi:

- a. Penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak;
- b. Penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan hak anak di semua klaster;
- c. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak;
- d. Peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat nasional dan daerah;
- e. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi (KLA); dan
- f. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia;

3. Peningkatan sinergitas dan kerja sama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan strategi:

- a. Meningkatkan pemahaman, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
- b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak bagi keluarga sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga;
- c. Peningkatan sinergitas melalui forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) untuk percepatan terwujudnya kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga;

- d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data; dan
- e. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi;

4. Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan *strategi*:

- a. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
- b. Meningkatkan kompetensi SDM (APH, Pekerja Sosial, dan lain-lain) dalam upaya memberikan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan TPPO;
- c. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan;
- d. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyediaan layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan;
- e. Meningkatkan pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan materi KIE; dan
- f. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan cakupan dan kualitas data kekerasan (termasuk TPPO) dan membangun sistem data kekerasan terpadu (dengan lembaga layanan, Forum Pengada Layanan, dan lain-lain) (Pengembangan SIMFONI-PPA)

5. Peningkatan perlindungan khusus anak, dengan *strategi* :

- a. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi social;

- b. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan;
- d. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak;
- e. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data yang memerlukan perlindungan khusus melalui peningkatan cakupan dan kualitas serta membangun sistem data kekerasan lintas kementerian/lembaga/perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang memberikan layanan sejenis. (Pengembangan SIMFONI-PPA)

6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapainya target kinerja;

- d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar; dan
- e. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja.

2). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi dan Misi Kemendagri sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah : **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**, dengan Misi yang dapat diselaraskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi; dan
2. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Misi tersebut bertujuan untuk :

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi dengan sasaran strategis berupa terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan diukur melalui indikator kinerja Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

3). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Visi dan Misi BKKBN sebagaimana Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 - 2024 adalah : **“Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, dengan Misi berupa :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi; dan

6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Tujuan BKKBN untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi yang dapat diselaraskan adalah :

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia dengan sasaran strategis meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sasaran strategis menurunnya angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) dengan indikator kinerja Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun

Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran yang dapat diselaraskan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga**, dengan **strategi**: 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga; 2) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB. 3) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan; dan 4) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga;

2. **Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk**, dengan **strategi**: 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), 2). Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk, dan 3) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan; **Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran**, dengan **strategi**: 1) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR; 2) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB;
4. **Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan**, dengan **strategi** Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
5. **Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi**, dengan **strategi** Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
3. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut RTRW Kota Cilegon adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Cilegon, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang

Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

Berdasarkan kewenangan bidang urusan pemerintahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat diintegrasikan perencanaan program pembangunan dengan RTRW Kota Cilegon.

Dalam situasi tertentu, perempuan dan anak sangat berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga perempuan dan anak mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Atas dasar tersebut, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, perencanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon dapat diselaraskan dengan program kegiatan perangkat daerah lainnya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon tidak terindikasi menimbulkan dampak khusus terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan pencemaran Lingkungan dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

4. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan telaahan secara Nasional, Provinsi dan Kota Cilegon maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.11
Rumusan Isu Strategis DP3AP2KB

Potensi Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Isu ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi pembangunan sektor sumber daya manusia yang masih belum optimal. Secara khusus, isu ini merespon berbagai kondisi yang berkaitan dengan isu pendidikan, di mana masih perlu ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya, pada bidang kesehatan yang masih perlu penguatan dan pemenuhan tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas layanannya. penguatan karakter turut diperlukan guna merespon perkembangan zaman dan meminimalisir kenakalan remaja. kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2024 sudah tercatat sebanyak 114 kasus. Selain itu permasalahan lain yaitu Peningkatan sinergi pusat-daerah dalam perlindungan perempuan dan anak; Percepatan penurunan stunting; Pemanfaatan reformasi birokrasi; Implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan; perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak; Peningkatan pelayanan KB dan pembangunan keluarga	Peningkatan daya saing sumber daya Manusia dan kesejahteraan	Perkembangan demografi global, peningkatan urbanisasi dunia	<i>Aging population</i> negara maju	Banten: Kualitas sumber daya manusia belum optimal Regional Jawa-Bali: belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran, belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan. Kota Cilegon : Penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan Belum Optimalnya Perlindungan terhadap Perempuan, Perlindungan terhadap Anak dan belum terpenuhinya hak anak secara komprehensif Belum optimalnya pemerataan pelayanan KB dan pembangunan keluarga Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah dan Sasaran

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan mengacu kepada Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon yang dituangkan dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2029, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon berperan dalam 3 misi Kepala Daerah terpilih yaitu **Misi 1 : Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas, Misi 3 : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas dan terjangkau, Misi 6 : Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon membidangi dua urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Oleh karena itu untuk mengakomodir kedua urusan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon memiliki tujuan yaitu **MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS**. Keberhasilan tujuan tersebut dapat diukur melalui pencapaian indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon yaitu :

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan
2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

3.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Keberhasilan sasaran tersebut dapat diukur melalui pencapaian indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon yaitu :

1. Terwujudnya kinerja DP3AP2KB yang akuntabel dan profesional, dapat dicapai dengan mengukur indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, dapat dicapai

dengan mengukur indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Perempuan dan Indeks Perlindungan Anak (IPA)

3. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas, dapat dicapai dengan mengukur indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Cilegon disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KETERAN GAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
- S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing - S.3.2 - Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat - S.4.3 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - S.6.3 - Meningkatnya kesejahteraan keluarga	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.247	0.246	0.244	0.242	0.240	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65.50:66.60	66.60:67.70	67.70:68.90	68.90:70.10	70.10:71.30	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71.70	72.10	72.50	72.90	73.30	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	45.34	46.38	47.42	48.46	49.50	
		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	76.90	80.50	84.10	88	90	
		Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74.00	75.15	76.30	77.45	78.60	

Sumber : <https://sipd.go.id>

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyempurnaan tingkat Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Penataan tingkat Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Pemantapan tingkat Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Penguatan tingkat Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Penguatan dan Pemantapan tingkat Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
Penyempurnaan wujud Keluarga yang Berkualitas	Penataan wujud Keluarga yang Berkualitas	Pemantapan wujud Keluarga yang Berkualitas	Penguatan wujud Keluarga yang Berkualitas	Penguatan dan Pemantapan wujud Keluarga yang Berkualitas
Penyempurnaan wujud Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Penataan wujud Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Pemantapan wujud Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Penguatan wujud Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Penguatan dan Pemantapan wujud Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2025-2029. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
			Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Penguatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
			Meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak
			Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan
		Peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Penjaminan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
			Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak
	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Penguatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera

Sumber : <https://sipd.go.id>

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan sebagai dimaksud adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan (8) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah, Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan, Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; (2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; dan (3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan diukur melalui indikator Persentase Anggaran Responsif Gender.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; (2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; (3) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program Peningkatan Kualitas Keluarga diukur melalui indikator Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak diukur melalui indikator Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan.

5. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; (2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Perlindungan Perempuan diukur melalui indikator

Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.

6. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; dan (2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Program Pemenuhan Hak Anak diukur melalui indikator Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar.

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; (2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan (3) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota. Program Perlindungan Khusus Anak diukur melalui indikator Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.

8. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; dan (2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Program Pengendalian Penduduk diukur melalui indikator Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) dan Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*).

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal; (2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); (3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; dan (4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) diukur melalui indikator Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (*Demand Satisfied*), Presentase Kehamilan Tidak Diinginkan/Direncanakan (KTD), Proporsi Kampung KB Mandiri.

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan (2) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) diukur melalui indikator Presentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA yang ber-KB, Indeks Lansia Berdaya dan Indeks Pengasuhan Remaja.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan, diperlukan Indikator Kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Penetapan indikator kinerja program Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon Tahun 2025-2029 telah selaras dengan indikator kinerja program RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2025 serta memperhatikan indikator kinerja program Renstra Kementerian/Lembaga setingkat Kementerian sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Kerangka pendanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon Tahun 2025-2029 berdasarkan rincian program kegiatan dan bersifat INDIKATIF beserta indikator kinerja program adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan DP3AP2KB Kota Cilegon

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				16.465.940.000		16.739.560.000		17.031.180.000		17.328.150.000		17.328.150.000		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.095.740.000		13.331.660.000		13.584.780.000		13.842.650.000		13.842.650.000		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	81	81	3.875.760.000	81	3.882.790.000	81	3.900.340.000	81	3.917.590.000	81	3.917.590.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Indeks Pelayanan Publik (point)	0	2		3		4		4,5		5			
	Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	0	60		65		75		85		90			
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.092.000		7.092.000		7.447.000		7.447.000		7.447.000		
Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	7.092.000	1	7.092.000	1	7.447.000	1	7.447.000	1	7.447.000		
2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				7.092.000		7.092.000		7.447.000		7.447.000		7.447.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	7.092.000	1	7.092.000	1	7.447.000	1	7.447.000	1	7.447.000		

	Pegawai (Dokumen)													
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.620.000		142.920.000		149.647.000		153.247.000		153.247.000		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	142.620.000	1	142.920.000	1	149.647.000	1	153.247.000	1	153.247.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1				1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		5.200.000		5.410.000		5.620.000		5.620.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.000.000	1	5.200.000	1	5.410.000	1	5.620.000	1	5.620.000		
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.380.000		15.760.000		16.150.000		16.150.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	15.380.000	1	15.760.000	1	16.150.000	1	16.150.000		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		31.500.000		33.080.000		34.730.000		34.730.000		

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	30.000.000	2	31.500.000	2	33.080.000	2	34.730.000	2	34.730.000		
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.900.000		11.450.000		12.030.000		12.640.000		12.640.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	10.900.000	1	11.450.000		12.030.000	1	12.640.000	1	12.640.000		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.540.000		65.540.000		68.817.000		68.817.000		68.817.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	1	65.540.000	1	65.540.000	1	68.817.000	1	68.817.000	1	68.817.000		
2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.430.000		9.910.000		10.410.000		10.940.000		10.940.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	9.430.000	1	9.910.000	1	10.410.000	1	10.940.000	1	10.940.000		
2.08.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.750.000		3.940.000		4.140.000		4.350.000		4.350.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	3.750.000	1	3.940.000	1	4.140.000	1	4.350.000	1	4.350.000		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.000.000		57.800.000		60.500.000		66.000.000		66.000.000		
Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8	55.000.000	8	57.800.000	8	60.500.000	8	66.000.000	8	66.000.000		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		57.800.000		60.500.000		66.000.000		66.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	8	55.000.000	8	57.800.000	8	60.500.000	8	66.000.000	8	66.000.000		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.233.451.460		3.234.660.000		3.238.030.000		3.241.560.000		3.241.560.000		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.233.451.460	1	3.234.660.000	1	3.238.030.000	1	3.241.560.000	1	3.241.560.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	4	3		3		3		3		3			

	dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	2		2		2		2		2			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.100.000		67.310.000		70.680.000		74.210.000		74.210.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	3	64.100.000	3	67.310.000	3	70.680.000	3	74.210.000	3	74.210.000		
2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				177.400.000		177.400.000		177.400.000		177.400.000		177.400.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	2	177.400.000	2	177.400.000	2	177.400.000	2	177.400.000	2	177.400.000		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.986.951.460		2.986.950.000		2.986.950.000		2.986.950.000		2.986.950.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	2.986.951.460	4	2.986.950.000	4	2.986.950.000	4	2.986.950.000	4	2.986.950.000		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363.150.000		363.810.000		364.490.000		365.200.000		365.200.000		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	32	363.150.000	32	363.810.000	32	364.490.000	32	365.200.000	32	365.200.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1	21		21		21		21		21			

	Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				326.150.000		326.150.000		326.150.000		326.150.000		326.150.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	21	326.150.000	21	326.150.000	21	326.150.000	21	326.150.000	21	326.150.000		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.000.000		22.660.000		23.340.000		24.050.000		24.050.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	32	22.000.000	32	22.660.000	32	23.340.000	32	24.050.000	32	24.050.000		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5	3.875.760.000	3,8	3.882.790.000	4	3.900.340.000	4,5	3.917.590.000	4,5	3.917.590.000	2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				28.500.000		30.010.000		31.580.000		33.230.000		33.230.000		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	28.500.000	1	30.010.000	1	31.580.000	1	33.230.000	1	33.230.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah		1		1		1		1		1			

	Tangga yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.750.000		11.540.000		12.370.000		12.370.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	10.000.000	1	10.750.000	1	11.540.000	1	12.370.000	1	12.370.000		
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.130.000		5.260.000		5.390.000		5.390.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	5.000.000	1	5.130.000	1	5.260.000	1	5.390.000	1	5.390.000		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000		7.880.000		8.270.000		8.680.000		8.680.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	7.500.000	1	7.880.000	1	8.270.000	1	8.680.000	1	8.680.000		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000		5.250.000		5.510.000		5.790.000		5.790.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.510.000	1	5.790.000	1	5.790.000		
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.546.540		39.898.000		41.846.000		43.896.000		43.896.000		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	39.546.540	12	39.898.000	12	41.846.000	12	43.896.000	12	43.896.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1		1		1		1		1			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	1.500.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.046.540		38.898.000		40.846.000		42.896.000		42.896.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	38.046.540	12	38.898.000	12	40.846.000	12	42.896.000	12	42.896.000		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.400.000		6.600.000		6.800.000		7.010.000		7.010.000		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	6.400.000	1	6.600.000	1	6.800.000	1	7.010.000	1	7.010.000		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.400.000		6.600.000		6.800.000		7.010.000		7.010.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	6.400.000	1	6.600.000	1	6.800.000	1	7.010.000	1	7.010.000		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	83,85	80	9.219.980.000	85	9.448.870.000	90	9.684.440.000	95	9.925.060.000	100	9.925.060.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	68,18	71		72		73		74		75			
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan				97.580.000		99.867.000		103.208.000		105.758.000		105.758.000		

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	97.580.000	1	99.867.000	1	103.208.000	1	105.758.000	1	105.758.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	6		6		6		7		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23.910.000		25.110.000		26.370.000		27.690.000		27.690.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	6	23.910.000	6	25.110.000	6	26.370.000	7	27.690.000	6	27.690.000		
2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.150.000	1	3.150.000	1	3.150.000	1	3.150.000	1	3.150.000		
2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.580.000		1.580.000		1.580.000		1.580.000		1.580.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.580.000	1	1.580.000	1	1.580.000	1	1.580.000	1	1.580.000		
2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.150.000	1	3.150.000	1	3.150.000	1	3.150.000	1	3.150.000		
2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.575.000		1.575.000		1.575.000		1.575.000		1.575.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	0	1	1.575.000	1	1.575.000	1	1.575.000	1	1.575.000	1	1.575.000		

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.065.000		16.400.000		16.800.000		17.200.000		17.200.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	4	16.065.000	4	16.400.000	4	16.800.000	4	17.200.000	4	17.200.000		
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.702.000		16.702.000		17.583.000		17.583.000		17.583.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	16.702.000	3	16.702.000	3	17.583.000	3	17.583.000	3	17.583.000		
2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				6.230.000		6.540.000		6.870.000		7.210.000		7.210.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	6.230.000	1	6.540.000	1	6.870.000	1	7.210.000	1	7.210.000		
2.08.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.718.000		11.160.000		11.630.000		12.120.000		12.120.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	10.718.000	1	11.160.000	1	11.630.000	1	12.120.000	1	12.120.000		
2.08.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.500.000		14.500.000		14.500.000		14.500.000		14.500.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	0	1	14.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000	1	14.500.000		

	n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah (Berita Acara)													
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.105.20 0.000		9.331.80 3.000		9.564.03 2.000		9.802.10 2.000		9.802.10 2.000		
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	9.105.20 0.000	2	9.331.80 3.000	2	9.564.03 2.000	2	9.802.10 2.000	2	9.802.10 2.000		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n)	40	45		45		45		45		45			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.054.79 6.000		9.281.39 9.000		9.513.62 8.000		9.751.69 8.000		9.751.69 8.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n)	40	45	9.054.79 6.000	45	9.281.39 9.000	45	9.513.62 8.000	45	9.751.69 8.000	45	9.751.69 8.000		
2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36.404.0 00		36.404.0 00		36.404.0 00		36.404.0 00		36.404.0 00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	36.404.0 00	4	36.404.0 00	4	36.404.0 00	4	36.404.0 00	4	36.404.0 00		
2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.00 0		2.500.00 0		2.500.00 0		2.500.00 0		2.500.00 0		

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000		
2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
2.08.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000		
2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				17.200.000		17.200.000		17.200.000		17.200.000		17.200.000		
Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	17.200.000	2	17.200.000	2	17.200.000	2	17.200.000	2	17.200.000		
	Jumlah Laporan Rekonsilias i dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.820.000		1.820.000		1.820.000		1.820.000		1.820.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	1.820.000	2	1.820.000	2	1.820.000	2	1.820.000	2	1.820.000		
2.08.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan				2.180.000		2.180.000		2.180.000		2.180.000		2.180.000		

Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	2.180.000	4	2.180.000	4	2.180.000	4	2.180.000	4	2.180.000		
2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000		13.200.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	13.200.000	12	13.200.000	12	13.200.000	12	13.200.000	12	13.200.000		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.437.500.000		1.466.300.000		1.495.600.000		1.525.500.000		1.525.500.000		
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	5	6	1.437.500.000	6,5	1.466.300.000	6,5	1.495.600.000	7	1.525.500.000	7	1.525.500.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				180.000.000		228.800.000		205.100.000		210.000.000		215.000.000		
Capaian Kinerja Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	0	180.000.000	1	228.800.000	0	205.100.000	0	210.000.000	0	215.000.000		
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0	36		36		36		36		36			
	jumlah OPD/kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	36		36		36		36		36			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		58.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan	Jumlah laporan hasil koordinasi	0	36	50.000.000	36	50.000.000	36	58.000.000	36	60.000.000	36	60.000.000		

PUG Kewenangan kab/ kota	dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)													
2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0		70.000.000		0		0		0		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	0	0	1	70.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		78.800.000		110.000.000		110.000.000		115.000.000		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	36	100.000.000	36	78.800.000	36	110.000.000	36	110.000.000	36	115.000.000		
2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		37.100.000		40.000.000		40.000.000		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	37.100.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	211	1.000.000.000	211	1.000.000.000	211	1.000.000.000	211	1.000.000.000	211	1.000.000.000		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatk	0	211	1.000.000.000	211	1.000.000.000	211	1.000.000.000	211	1.000.000.000	211	1.000.000.000		

	an bimtek atau pelatihan (Orang)													
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				257.500.000		237.500.000		290.500.000		315.500.000		310.500.000		
Capaian Kinerja Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	5	257.500.000	7	237.500.000	8	290.500.000	10	315.500.000	10	310.500.000		
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	40		40		40		40		40			
	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1		0		0		0		0			
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				37.500.000		37.500.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	37.500.000	1	37.500.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		0		0		0		0		

terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	5	50.000.000	7	50.000.000	8	80.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi				150.000.000		150.000.000		165.500.000		165.500.000		160.500.000		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	40	150.000.000	40	150.000.000	40	165.500.000	40	165.500.000	40	160.500.000		
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan				1.437.500.000		1.466.300.000		1.495.600.000		1.525.500.000		1.525.500.000	2.08.2.14.0.00 .02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
													2.08.2.14.0.00 .02.0002 - UPTD Keluarga Berencana	
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	2.08.2.14.0.00 .02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		

Capaian Kinerja Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	83	83	120.000.000	83	120.000.000	83	120.000.000	83	120.000.000	83	120.000.000		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	83	83	120.000.000	83	120.000.000	83	120.000.000	83	120.000.000	83	120.000.000		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		
Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	60	380.000.000	60	380.000.000	58	380.000.000	58	380.000.000	58	380.000.000		

	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)	0	60		60		58		58		58			
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)	0	16		16		16		16		16			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)	0	20		19		19		18		18			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)	0	60		60		58		58		58			
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)	0	16	21.000.000	16	21.000.000	16	21.000.000	16	21.000.000	16	21.000.000		
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang	0	20	16.000.000	19	16.000.000	19	16.000.000	18	16.000.000	18	16.000.000		

	mendapatk an layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten /Kota (Orang)													
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				132.000. 000		132.000. 000		132.000. 000		132.000. 000		132.000. 000		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatk an Layanan Pengaduan atau Penjangkau an bagi Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)	0	60	132.000. 000	60	132.000. 000	58	132.000. 000	58	132.000. 000	58	132.000. 000		
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				72.625.0 00		72.625.0 00		72.625.0 00		72.625.0 00		72.625.0 00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatk an layanan rumah perlintunga n bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)	0	10	72.625.0 00	10	72.625.0 00	10	72.625.0 00	10	72.625.0 00	10	72.625.0 00		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				63.000.0 00		63.000.0 00		63.000.0 00		63.000.0 00		63.000.0 00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatk an Layanan Pengaduan atau Penjangkau an korban Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)	0	60	63.000.0 00	60	63.000.0 00	58	63.000.0 00	58	63.000.0 00	58	63.000.0 00		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				75.375.0 00		75.375.0 00		75.375.0 00		75.375.0 00		75.375.0 00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatk an pendampin gan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (orang)	0	60	75.375.0 00	60	75.375.0 00	58	75.375.0 00	58	75.375.0 00	58	75.375.0 00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				300.000. 000		300.000. 000		300.000. 000		300.000. 000		300.000. 000		

Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0.	12,5	300.000.000	37,5	300.000.000	62,5	300.000.000	87,5	300.000.000	100	300.000.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		136.000.000		136.000.000		136.000.000		136.000.000		
Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	86	150.000.000	86	136.000.000	86	136.000.000	86	136.000.000	86	136.000.000		
	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	0	1		0		0		0		0			
	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	86	50.000.000	86	50.000.000	86	50.000.000	86	50.000.000	86	50.000.000		
2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				80.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang	0	1	80.000.000	1	86.000.000	1	86.000.000	1	86.000.000	1	86.000.000		

	ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)													
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Capaian Kinerja Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	1	50.000.000		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	3		3		3		3		3			
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		34.000.000		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	34.000.000		
2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		16.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan	0	1	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	1	16.000.000		

	gan kewenang an Kabupaten/ Kota (Lembaga)													
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				110.000. 000		114.000. 000		114.000. 000		114.000. 000		114.000. 000		
Capaian Kinerja Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatk an Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/ Kota (Orang)	0	45	110.000. 000	45	114.000. 000	45	114.000. 000	55	114.000. 000	55	114.000. 000		
	Jumlah keluarga yang mendapatk an layanan rujukan Lingkup Kabupaten/ Kota (Orang)	0	10		10		12		15		15			
	Jumlah keluarga yang mendapatk an layanan penjangkau an Lingkup Kabupaten/ Kota (Orang)	0	5		8		10		12		15			
	Jumlah keluarga yang mendapatk an layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/ Kota (Orang)	0	40		45		45		50		55			
	Jumlah keluarga yang mendapatk an Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/ Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			
2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				5.000.00 0		7.000.00 0		7.000.00 0		7.000.00 0		7.000.00 0		
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatk an layanan penjangkau an Lingkup Kabupaten/ Kota (Orang)	0	5	5.000.00 0	8	7.000.00 0	10	7.000.00 0	12	7.000.00 0	15	7.000.00 0		
2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota				5.000.00 0		7.000.00 0		7.000.00 0		7.000.00 0		7.000.00 0		
Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatk an layanan rujukan Lingkup Kabupaten/ Kabupaten/	0	10	5.000.00 0	10	7.000.00 0	12	7.000.00 0	15	7.000.00 0	15	7.000.00 0		

	Kota (Orang)													
2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	40	10.000.000	45	10.000.000	45	10.000.000	50	10.000.000	55	10.000.000		
2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	45	10.000.000	45	10.000.000	45	10.000.000	55	10.000.000	55	10.000.000		
2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak				0		0		0		0		0	2.08.2.14.0.00 .02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				45.000.000		45.900.000		46.900.000		47.800.000		47.800.000		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	45.000.000	100	45.900.000	100	46.900.000	100	47.800.000	100	47.800.000	2.08.2.14.0.00 .02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000		45.900.000		46.900.000		47.800.000		47.800.000		
Capaian Kinerja Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang	0	1	45.000.000	1	45.900.000	1	46.900.000	1	47.800.000	1	47.800.000		

Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia (Dokumen)													
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				45.000.000		45.900.000		46.900.000		47.800.000		47.800.000		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Dokumen)	0	1	45.000.000	1	45.900.000	1	46.900.000	1	47.800.000	1	47.800.000		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak				0		0		0		0		0	2.08.2.14.0.00 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				400.000.000		408.000.000		416.200.000		424.500.000		424.500.000		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	30	40	400.000.000	45	408.000.000	50	416.200.000	60	424.500.000	70	424.500.000	2.08.2.14.0.00 .02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000		208.000.000		216.200.000		224.500.000		224.500.000		
Capaian Kinerja Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota (Lembaga)	36	36	200.000.000	36	208.000.000	36	216.200.000	36	224.500.000	36	224.500.000		
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000		208.000.000		216.200.000		224.500.000		224.500.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan advokasi dan	36	36	200.000.000	36	208.000.000	36	216.200.000	36	224.500.000	36	224.500.000		

Kewenangan Kabupaten/Kota	sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)													
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	36	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	36	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				687.700.000		687.700.000		687.700.000		687.700.000		687.700.000		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	687.700.000	100	687.700.000	100	687.700.000	100	687.700.000	100	687.700.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap				221.600.000		221.600.000		221.600.000		221.600.000		221.600.000		

Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
Capaian Kinerja Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan n KtA tingkatKab/ Kota (Kegiatan)	5	3	221.600.000	3	221.600.000	3	221.600.000	3	221.600.000	3	221.600.000		
	Jumlah kebijakan pencegahan n KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	1	1		1		1		1		1			
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan n KtA tingkatKab/ Kota (Kegiatan)	5	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000		
2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				91.600.000		91.600.000		91.600.000		91.600.000		91.600.000		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan n KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	1	1	91.600.000	1	91.600.000	1	91.600.000	1	91.600.000	1	91.600.000		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				191.000.000		191.000.000		191.000.000		191.000.000		191.000.000		
Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan an khusus anak (Dokumen)	1	1	191.000.000	1	191.000.000	1	191.000.000	1	191.000.000	1	191.000.000		
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	44	43		43		43		43		43			

	Daerah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)													
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				91.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	44	43	91.000.000	43	91.000.000	43	91.000.000	43	91.000.000	43	91.000.000		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	687.700.000	100	687.700.000	100	687.700.000	100	687.700.000	100	687.700.000	2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100		100		100		100		100			
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				275.100.000		275.100.000		275.100.000		275.100.000		275.100.000		
Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)		40	275.100.000	40	275.100.000	40	275.100.000	40	275.100.000	40	275.100.000		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus	0	20		19		19		18		18			

	bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)													
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)		10		10		10		10		10			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)		70		68		65		63		60			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)		70		68		65		63		60			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)	0	3		3		5		5		5			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Orang)		20		20		20		20		20			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				108.800.000		108.800.000		108.800.000		108.800.000		108.800.000		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)		70	108.800.000	68	108.800.000	65	108.800.000	63	108.800.000	60	108.800.000		

2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5.400.00 0		5.400.00 0		9.000.00 0		9.000.00 0		9.000.00 0		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)	0	3	5.400.00 0	3	5.400.00 0	5	9.000.00 0	5	9.000.00 0	5	9.000.00 0		
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				7.500.00 0		7.500.00 0		6.900.00 0		6.900.00 0		6.900.00 0		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)	0	20	7.500.00 0	19	7.500.00 0	19	6.900.00 0	18	6.900.00 0	18	6.900.00 0		
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				9.600.00 0		9.600.00 0		6.600.00 0		6.600.00 0		6.600.00 0		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)		10	9.600.00 0	10	9.600.00 0	10	6.600.00 0	10	6.600.00 0	10	6.600.00 0		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				108.800. 000		108.800. 000		108.800. 000		108.800. 000		108.800. 000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)		70	108.800. 000	68	108.800. 000	65	108.800. 000	63	108.800. 000	60	108.800. 000		
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				25.000.0 00		25.000.0 00		25.000.0 00		25.000.0 00		25.000.0 00		
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat		20	25.000.0 00	20	25.000.0 00	20	25.000.0 00	20	25.000.0 00	20	25.000.0 00		

	Daerah Kabupaten/ Kota (Orang)													
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)		40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.612.600.000		4.718.900.000		4.825.400.000		4.931.900.000		4.931.900.000		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				160.000.000		183.600.000		187.300.000		191.100.000		191.100.000		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,08	2,08	160.000.000	2,07	183.600.000	2,07	187.300.000	2,07	191.100.000	2,07	191.100.000	2.08.2.14.0.00 .02.0000 - DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK SERTA PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	9.1-9.1	8.0-7.1		7.1-6.3		6.3-5.5		5.5-4.9		4.9-4.3			
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				11.500.000		35.100.000		31.200.000		42.600.000		42.600.000		
Capaian Kinerja Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	-	-	11.500.000	-	35.100.000	1	31.200.000	-	42.600.000	-	42.600.000		

	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	-	5		5		5		5		5			
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana				2.000.000		12.020.000		7.600.000		14.200.000		14.200.000		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	-	4	2.000.000	4	12.020.000	4	7.600.000	4	14.200.000	4	14.200.000		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				4.500.000		11.060.000		8.400.000		14.200.000		14.200.000		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	4.500.000	1	11.060.000	1	8.400.000	1	14.200.000	1	14.200.000		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				5.000.000		12.020.000		7.600.000		14.200.000		14.200.000		

Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	-	5	5.000.000	5	12.020.000	5	7.600.000	5	14.200.000	5	14.200.000		
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0		0		7.600.000		0		0		
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	-	-	0	-	0	1	7.600.000	-	0	-	0		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				148.500.000		148.500.000		156.100.000		148.500.000		148.500.000		
Capaian Kinerja Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	-	1	148.500.000	1	148.500.000	1	156.100.000	1	148.500.000	1	148.500.000		
	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	-	-		-		1		-		-			
	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				48.500.000		48.500.000		48.500.000		48.500.000		48.500.000		

Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	48.500.000	1	48.500.000	1	48.500.000	1	48.500.000	1	48.500.000			
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000			
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	-	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000			
2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana (Laporan)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000			
2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan				0		0		7.600.000		0		0			
Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	-	-	0	-	0	1	7.600.000	-	0	-	0			
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.679.074.000		1.701.200.000		1.786.200.000		1.871.200.000		1.871.200.000			
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	15,2	13,8	1.679.074.000	13,1	1.701.200.000	12,5	1.786.200.000	11,9	1.871.200.000	11,3	1.871.200.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Proporsi Kampung KB Mandiri (%)	62,8	63,6				64		64,5		64,9			65,3	
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	68,7	69,7				70,2		70,7		71,2			71,5	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				476.000.000		493.000.000		505.000.000		535.000.000		535.000.000			
Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	-	4	476.000.000	4	493.000.000	4	505.000.000	4	535.000.000	4	535.000.000			

	kan, dan Keluarga Berencana) (Unit)													
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	34	28		28		28		28		28			
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	8	3		3		3		3		3			

	Luar Ruang (Dokumen)													
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				25.000.000		27.000.000		30.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	-	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000		
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		

Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	8	110.000.000	8	110.000.000	8	110.000.000	8	110.000.000	8	110.000.000		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	8	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				21.000.000		36.000.000		45.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	21.000.000	1	36.000.000	1	45.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan)	34	28	160.000.000	28	160.000.000	28	160.000.000	28	160.000.000	28	160.000.000		

	nan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)													
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				52.000.000		53.000.000		54.000.000		55.000.000		55.000.000		
Capaian Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.650	348	52.000.000	348	53.000.000	348	54.000.000	348	55.000.000	348	55.000.000		
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.650	348	20.000.000	348	20.000.000	348	20.000.000	348	20.000.000	348	20.000.000		

2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				7.000.00 0		8.000.00 0		9.000.00 0		10.000.0 00		10.000.0 00		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	-	1	7.000.00 0	1	8.000.00 0	1	9.000.00 0	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				878.074. 000		880.200. 000		946.200. 000		985.200. 000		985.200. 000		
Capaian Kinerja Kegiatan Pengendalian Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	878.074. 000	1	880.200. 000	1	946.200. 000	1	985.200. 000	1	985.200. 000		
	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	-	6		6		6		6		6			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	712	1.147		1.147		1.147		1.147		1.147			

	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				44.100.000		44.100.000		44.100.000		44.100.000		44.100.000		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	44.100.000	1	44.100.000	1	44.100.000	1	44.100.000	1	44.100.000		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				476.100.000		476.100.000		476.100.000		476.100.000		476.100.000		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	712	1.147	476.100.000	1.147	476.100.000	1.147	476.100.000	1.147	476.100.000	1.147	476.100.000		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	-	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		

	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)													
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				257.874.000		260.000.000		325.000.000		364.000.000		364.000.000		
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	1	1	257.874.000	1	260.000.000	1	325.000.000	1	364.000.000	1	364.000.000		
2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria				5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				273.000.000		275.000.000		281.000.000		296.000.000		296.000.000		
Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	-	43	273.000.000	43	275.000.000	43	281.000.000	43	296.000.000	43	296.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				261.000.000		261.000.000		261.000.000		261.000.000		261.000.000		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	-	43	261.000.000	43	261.000.000	43	261.000.000	43	261.000.000	43	261.000.000		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas				12.000.000		14.000.000		20.000.000		35.000.000		35.000.000		

Sektor di Kampung KB															
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	-	1	12.000.000	1	14.000.000	1	20.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000			
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2.773.526.000		2.834.100.000		2.851.900.000		2.869.600.000		2.869.600.000			
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Remaja (Indeks)	86,9	88,5	2.773.526.000	89,3	2.834.100.000	90,2	2.851.900.000	91	2.869.600.000	91,9	2.869.600.000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,5	57,5				58		58,5		59			59,5	
	Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UP PKS yang ber-KB (%)	87,5	87,71				87,81		87,91		88,02			88,12	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				562.526.000		623.100.000		640.900.000		658.600.000		658.600.000			
Capaian Kinerja Kegiatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	1	1	562.526.000	1	623.100.000	1	640.900.000	1	658.600.000	1	658.600.000			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	1	1				1		1		1				
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R))	2	2				2		2		2			2	

	Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dibentuk (Kelompok)												
	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	0	1		2		2		2		2		
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	31	32		32		32		32		32		
	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKA) (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL				40.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga	0	1	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	

	Lansia (Kegiatan)													
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				30.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				424.000.000		424.000.000		424.000.000		424.000.000		424.000.000		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	31	32	424.000.000	32	424.000.000	32	424.000.000	32	424.000.000	32	424.000.000		
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				40.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1	1	40.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		
2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga				5.000.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		

Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.500.000		
2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				5.000.000		7.500.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		
Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.500.000		
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				18.526.000		34.100.000		50.900.000		38.600.000		37.600.000		
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2	2	18.526.000	2	34.100.000	2	50.900.000	2	38.600.000	2	37.600.000		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan				2.211.000.000		2.211.000.000		2.211.000.000		2.211.000.000		2.211.000.000		

Kesejahteraan Keluarga														
Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0	1	2.211.00 0.000	1	2.211.00 0.000	1	2.211.00 0.000	1	2.211.00 0.000	1	2.211.00 0.000		
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.005.00 0.000		1.005.00 0.000		1.005.00 0.000		1.005.00 0.000		1.005.00 0.000		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0	1	1.005.00 0.000	1	1.005.00 0.000	1	1.005.00 0.000	1	1.005.00 0.000	1	1.005.00 0.000		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.206.00 0.000		1.206.00 0.000		1.206.00 0.000		1.206.00 0.000		1.206.00 0.000		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0	1	1.206.00 0.000	1	1.206.00 0.000	1	1.206.00 0.000	1	1.206.00 0.000	1	1.206.00 0.000		

Sumber : <https://sipd.go.id>

4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Kepala Daerah/ Janji Politis

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon dalam rentang waktu tahun 2025 - 2029 tidak memiliki sub kegiatan khusus yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah, tetapi sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon menjadi penunjang dalam pembangunan daerah Kota Cilegon.

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Kepala Daerah/ Janji Politis

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		NIHIL		0
				0

Sumber : <https://sipd.go.id>

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja utama perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cilegon :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,248	0,248	0,247	0,246	0,244	0,242	0,240	
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64.40:64.40	64.40:65.50	65.50:66.60	66.60:67.70	67.70:68.90	68.90:70.10	70.10:71.30	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	43,26	44,43	45,34	46,38	47,42	48,46	49,5	
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,9	71,3	71,7	72,1	72,5	72,9	73,3	
5.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	70,4	73,6	76,9	80,5	84,1	88	90	
6.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	72,85	72,85	74	75,15	76,3	77,45	78,6	

Sumber : <https://sipd.go.id>

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran terukur yang mencerminkan keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang diturunkan dari RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. IKD digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,08	2,08	2,08	2,07	2,07	2,07	2,07	
2	Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB	%	87,5	87,6	87,71	87,81	87,91	88,02	88,12	
3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9.1-9.1	9.1-8.0	8.0-7.1	7.1-6.3	6.3-5.5	5.5-4.9	4.9-4.3	
2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak										
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									

1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Sumber : <https://sipd.go.id>

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pendanaan dalam periode tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025 – 2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2025-2029.

Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025-2029, perlu memperhatikan kaidah-kaidah seperti Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan DP3AP2KB Kota Cilegon berpedoman pada Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD tahunan.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon Tahun 2025-2029 perlu dilakukan Rencana Tindak Lanjut, yaitu setiap akhir tahun pelaksanaan pembangunan dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Cilegon, September 2025

KEPALA DP3AP2KB KOTA CILEGON



Hj. Lia Nurlia Mahatma, ST., M.Si.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197107081997032005

LAMPIRAN

Tabel Cascading Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan / Subkegiatan DP3AP2KB Kota Cilegon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
- S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing - S.6.3 - Meningkatnya kesejahteraan keluarga - S.3.2 - Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat - S.4.3 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ((%) Indeks)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)		
		Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)		
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.08.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.08.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.08.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.08.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.08.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan ((%) Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Capaian Kinerja Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Capaian Kinerja Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			perlakuan salah lainnya terhadap anak				
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	
		Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)		
					Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan anak yang aktif dan sesuai standar (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	
					Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Proporsi Kampung KB Mandiri (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)		
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pengendalian Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
					Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA/UPPKS yang ber-KB (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks Pengasuhan Remaja (Indeks)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- S.6.3 - Meningkatkan kesejahteraan keluarga - S.3.2 - Meningkatkan kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat - S.4.3 - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS	Terwujudnya Kinerja DP3AP2KB yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak				
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan				
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak				
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Perempuan dalam Pembangunan				
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak				
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak				
2.08.2.14.0.00.02.0002 - UPTD Keluarga Berencana							
- S.3.2 - Meningkatkan kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat - S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing - S.6.3 - Meningkatkan kesejahteraan keluarga - S.4.3 - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan				

Sumber : <https://sipd.go.id>

Tabel Indikator Kinerja Utama Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,248	0,247	0,246	0,244	0,242	0,240	
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64.40:65.50	65.50:66.60	66.60:67.70	67.70:68.90	68.90:70.10	70.10:71.30	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	44,43	45,34	46,38	47,42	48,46	49,5	
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,3	71,7	72,1	72,5	72,9	73,3	
5.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	73,6	76,9	80,5	84,1	88	90	
6.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	72,85	74	75,15	76,3	77,45	78,6	

Tabel Indikator Kinerja Kunci Renstra DP3AP2KB Kota Cilegon

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9.1-8.0	8.0-7.1	7.1-6.3	6.3-5.5	5.5-4.9	4.9-4.3	
5.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)		2.08	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	
6.	Presentase Anggota BKB, BKR, BKL dan UPPKA yang ber-KB	Persentase	87.60	87.71	87.81	87.91	88.02	88.12	